EDISI 901/5 - 15 NOVEMBER 2026

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

KPK: Kerugian Negara Korupsi Cukai PT Djarum Triliunan

JAKARTA, BN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara terkait dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai yang menyeret PT Djarum mencapai triliunan rupiah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus itu adalah pengembangan dari perkara di lingkungan Bea Cukai

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

ISTANA: PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO, MAKAR

❑ Yusril : Jokowi Berpeluang Diperiksa

JAKARTA, BN - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, perbuatan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan para jenderal Polri lainnya yang menyadap Presiden Prabowo Subianto termasuk perbuatan makar.

"KAMI juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," ujar

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). **(Ist)**



Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra saat jumpa pers. **(ist)**

Profil 3 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, BN - Polri telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sigit ditetapkan sebagai tersangka bersama dua jenderal lain, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiga tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap Prabowo, tokoh politik, media, hingga pengusaha secara ilegal sejak 2025. Kasus ini terungkap pada Oktober 2026. Inilah profil para tersangka;

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sigit lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Sigit lulus dari Akpol pada 1991. Dia pernah mengemban sejumlah jabatan di Polri, antara lain Kapolres Pati pada 2009, Wakapolrestabes Semarang pada 2010, Kapolresta Surakarta (Solo) pada 2011, Kapolda Banten pada 2016, Kadiv Propam Polri pada 2018, Kabareskrim Polri pada 2019, hingga akhirnya dipilih sebagai Kapolri pada 2021.

Sigit juga pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada 2014 hingga 2016. Selama bertugas di Polri, Sigit pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo | *Irjen Pol Ahrie Sonta* | *Irjen Eko Hadi*

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BEA DAN CUKAI PASURUAN

CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL

ROKOK POLOS
Rokok yang pada kemasannya tidak/tanpa dilekati pita cukai dengan maksud untuk menghindari pembayaran cukai

ROKOK BERPITA CUKAI PALSU
Rokok yang pada kemasannya dilekati pita cukai palsu atau dipalsukan

ROKOK BERPITA CUKAI BEKAS
Rokok yang kemasannya dilekati pita cukai bekas atau sudah pernah dipakai sebelumnya

ROKOK BERPITA CUKAI YANG BUKAN HAKNYA
Rokok yang pada kemasannya dilekati pita cukai milik perusahaan lain

ROKOK BERPITA CUKAI YANG BUKAN PERUNTUKANNYA
Rokok yang pada kemasannya dilekati pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya.

GEMPUR ROKOK ILEGAL

BAHAYA ROKOK ILEGAL

BAHAYA KESEHATAN LEBIH TINGGI
Karena tidak diawasi, rokok ilegal sering kali mengandung kadar nikotin dan tar yang jauh lebih tinggi dari batas aman, meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan pernapasan secara lebih cepat.

KERUGIAN EKONOMI NEGARA
Rokok ilegal tidak membayar pita cukai, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan negara untuk mendanai kesehatan dan infrastruktur.

TINGGINYA PEROKOK PEMULA
Harga yang sangat murah membuat rokok ilegal mudah dijangkau oleh anak-anak dan remaja.

"Jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai."

SCAN HERE

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT!

HUBUNGI: BRAVO BEA CUKAI
0895323407724

Kurangi Banjir, Bupati Subandi Sidak Pembangunan Rumah Pompa di Jati dan Sekardangan

SURABAYA, BN – Wilayah langganan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjelang musim hujan. Pembangunan rumah pompa terus dipantau sebagai upaya mengurangi potensi genangan.

SENIN (26/10/2026), Bupati Sidoarjo H Subandi bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) progres pembangunan dua rumah pompa. Yakni, di Jalan Jati depan Lippo Plaza dan rumah pompa Sekardangan.

Dalam peninjauan di rumah pompa Jalan Jati, Bupati Subandi menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, terutama penggunaan material dan pengerjaan pasangan batu agar sesuai standar yang ditentukan.

"Secara progres, pekerjaan ini harus terus dikawal agar selesai tepat waktu. Namun, yang tidak kalah penting adalah kualitas pekerjaan dan material yang digunakan. Kalau ada bagian yang kurang baik, harus segera diperbaiki sebelum serah terima, sehingga tidak menimbulkan pekerjaan berulang," tegasnya.

Ia berharap pembangunan rumah pompa di depan Lippo Plaza dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi potensi genangan dan banjir di kawasan tersebut.

Pengawasan secara berkala perlu dilakukan agar hasil pembangunan benar-benar berfungsi optimal, terutama saat curah hujan meningkat.

Berdasar hasil peninjauan, progres pembangunan rumah pompa di Jalan Jati depan Lippo Plaza menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 10 persen. Meski demikian, Bupati menegaskan agar pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan material tetap ditingkatkan. Bagian konstruksi yang ditemukan kurang baik harus segera diperbaiki sebelum serah terima. Dengan begitu, rumah pompa dapat berfungsi optimal untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan.

Selanjutnya, Bupati Subandi meninjau pembangunan rumah pompa di Sekardangan. Ia meminta agar pembangunan embung dan rumah pompa tidak hanya berorientasi pada penanganan banjir. Tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

"Alhamdulillah, pembangunan ini berjalan dengan baik. Saya minta agar embung ini nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk menampung air dan mengatasi banjir, tetapi juga mendukung penataan lingkungan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Harapannya, setelah persoalan banjir tertangani, UMKM di sekitar sini juga dapat beraktivitas dengan baik," ujarnya.



Bupati Sidoarjo H Subandi bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) lakukan inspeksi mendadak proyek pompa di Jalan Jati depan Lippo Plaza dan rumah pompa Sekardangan. **(yah)**

Sementara itu, Kepala Dinas

■ **Bersambung ke hal.11 kol.1**

Gebyar PAUD Kabupaten Ngawi Tahun 2026



Persiapan acara gebyar PAUD **(Foto. dok: Ashar/ bidiknasional.com)**

NGAWI, BN – Meriah di pagi yang ceria, Rabu (4/11) berbeda dengan hari-hari biasa di halaman Pendopo Kabupaten terlihat anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-Kanak) didampingi para orang tua nya se-Kabupaten Ngawi memenuhi halaman Pendopo Wedya Graha.

Sambutan ketua panitia yang disampaikan oleh Kabul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kegiatan paud yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya di alun-alun karena tahun ini ada kegiatan POPDA maka Gebyar Paud Tahun 2026 diadakan di halaman Pendopo Wedya Graha Ngawi. "Maksud dan tujuan diadakan ini adalah yang pertama untuk memperkuat karakter dan kreatifitas anak-anak PAUD," kata Kabul dalam penyampaiannya.

Lanjut Kabul, yang pertama yang kedua adalah memperkokoh hubungan pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan PAUD tetap sejalan dan seirama dan yang ke tiga yaitu, menyenjukan bahwa sekolah itu aman dan nyaman bagi anak didik atau pendidik yang dilingkungan Kabupaten Ngawi.

H. Ony Anwar Harsono, S.T, M.H sebagai Bupati Ngawi beserta Ibu menghadiri Gebyar PAUD 2026, tampak hadir pula Kabul Tunggul Winarno, S.IP Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi dan lainnya.

Pembukaan Gebyar PAUD di isi dengan hiburan acara tari-tarian membuat khusus para anak siswa Paud dan TK se-kabupaten Ngawi sangat terhibur meskipun sinar pagi mulai menerpanya.

Sambutan sebagai pengarahan, Ony Bupati Ngawi menyampaikan bahwa pendidikan Usia Dini merupakan pembinaan atau karakter yang berkesinambungan dalam arti pengadaan atau gelar gebyar tahunan ini bukan hanya secara seremonial saja dalam arti hanya menggugurkan kewajiban saja.

"Memberikan dasar pembinaan ataupun pembentukan karakter secara konsisten kepada pendidikan anak usia dini maka mereka akan menerima secara diam dalam menempuh pendidikan lebih lanjut. Anak-anak usia di bawah 5 tahun, mereka butuh mengekspresikan diri, senang dan gembira, sehingga kita hanya menstimulasinya bagaimana koordinasi otak kiri & kanan bisa berjalan secara haromonis," kata Bupati.

Lanjut beliau pula, Otak kanan secara emosi bagaimana pola-pola bisa dijalankan kemudian bisa dijalankan dan otak kiri lebih detail untuk bisa melihat segala sesuatunya dengan datar dan ini membutuhkan waktu secara periodik. "Tidak harmonisnya otak kanan dan kiri, maka akan terjadi kecenderungan ada anak belajar terus namun sosialisasi dan empati kurang dan bila otak kanan saja, maka anak tersebut anak tersebut hanya bermain dan atau mainnya saja, sehingga bagaimana caranya pembinaan otak kanan dan kirinya bisa harmonis dan selaras," pungkasnya. **(Ashar)**

Polresta Sidoarjo Ringkus Tiga Tersangka Aksi Kekerasan Anak di Bawah Umur



Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra dalam konferensi pers, Rabu (28/10/ 2026). **(yah)**

SIDOARJO, BN – Satres PPA dan PPO Polresta Sidoarjo mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang anak berusia 15 tahun di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dalam peristiwa yang terjadi pada 30 September 2026 tersebut, korban mengalami luka akibat senjata tajam jenis celurit.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial RPA (17), YA (19), dan FEW (21). Mereka ditangkap pada Jumat (16/10/ 2026) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula ketika korban sedang membeli mi goreng di sebuah warung . Saat itu, para tersangka bersama kelompoknya melintas dan melihat korban mengenakan pakaian dengan atribut kelompok tertentu.

Melihat atribut yang dikenakan korban, para tersangka kemudian berhenti dan menghampirinya. Korban selanjutnya ditarik secara paksa keluar dari area warung oleh para pelaku.

Dua tersangka, RPA dan YA, diduga berperan menyeret serta memukul korban.

Sementara itu, FEW diduga menggunakan senjata tajam jenis celurit berwarna ungu untuk melukai korban pada bagian punggung dan kaki.

Setelah melakukan kekerasan, para tersangka juga merampas kaus yang dikenakan korban dan membawanya pergi. Korban kemudian ditinggalkan di lokasi kejadian.

"Aksi kekerasan diduga dilatarbelakangi solidaritas terhadap salah seorang teman tersangka yang sebelumnya disebut mengalami kekerasan oleh kelompok tertentu. Para tersangka kemudian melakukan konvoi untuk mencari orang yang mengenakan atribut kelompok tersebut," ujar Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra dalam konferensi pers, Rabu (28/10/2026) di Mapolresta Sidoarjo. **(yah)**

Sidoarjo Kirim 346 Atlet Berlaga di POPDA XV dan PEPARDA III Jatim 2026

SIDOARJO, BN – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengirimkan sebanyak 346 atlet untuk berlaga dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV dan Pekan Paralimpiade Daerah (PEPARDA) III Jawa Timur 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 330 atlet POPDA dan 16 atlet PEPARDA.



Bupati Sidoarjo, Subandi, berharap seluruh atlet mampu menorehkan prestasi gemilang dan membawa nama baik Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan dan masa depan atlet.Hal tersebut disampaikan Subandi saat melepas kontingen atlet Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (2/11/2026).

Subandi mengingatkan bahwa pada POPDA 2024, Sidoarjo berhasil menduduki peringkat ketiga dengan raihan 87 medali. Perolehan tersebut terdiri dari 29 medali emas, 31 perak, dan 27 perunggu.

"Tahun ini, dengan hati yang teguh, tekad tinggi, dan rasa percaya diri, kita harus optimistis meraih hasil yang lebih baik lagi di POPDA dan PEPARDA 2026," ujar Subandi di hadapan para atlet dan tamu undangan.

Selain menargetkan peningkatan prestasi, Subandi juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan dan masa depan atlet. Ia tidak ingin atlet potensial Sidoarjo berpindah memperkuat daerah lain karena merasa kurang mendapatkan perhatian.

Menurutnya, dukungan pemerintah tidak boleh sebatas pemberian bonus ketika atlet berhasil meraih medali. Jaminan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga harus menjadi bagian dari pembinaan atlet. "Jangan sampai anak-anak pelajar kita pindah ke daerah lain karena alasannya bonus kurang tinggi atau masa depan tidak jelas. Pendidikannya kita jamin melalui beasiswa, kesehatan dan BPJS wajib kita berikan," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan

■ **Bersambung ke hal.11 kol.5**

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI
BIDIK NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999
PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB :** Edy Sutanto. **PEMIMPIN PERUSAHAAN :** Teddy Syah Roni. **PENASEHAT HUKUM :** Yustinus Haryanto, SH. **REDAKTUR PELAKSANA :** Budi Santoso. **REDAKTUR :** A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. **TIM LIPUTAN KHUSUS :** Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto, Supardi. **JAWA TIMUR : SURABAYA :** Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. **SIDOARJO:** Nur Yahya. **GRESIK :** Ariadi AM, Subkan Arif. **PAMEKASAN :** Ainur Halis. **SUMENEP :** Adi Yusman, Ishak. **SAMPANG** : Holillurohman. **MOJOKERTO :** Husnan. **JOMBANG :** Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. **NGANJUK :** Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. **KEDIRI :** Nyoto Dharmawan. **TULUNGAGUNG/TRENGGALEK :** Nik Atin. **MADIUN:** Basuki. **NGAWI :** Yoseph, Suwarsana. **MAGETAN :** Ashar AR. **PONOROGO :** Andhy Wijaya. **LAMONGAN :** Syaiful Anam, Joko Santoso. **BOJONEGORO :** Priyanto. **MALANG RAYA :** Nino Wiwantara. **BLITAR :** Budi Sastro. **PASURUAN :** Toddy Pras Hendarto, **PROBOLINGGO/LUMAJANG :** Sonny Narwani. :**JEMBER :** Agus Budiono. **SITUBONDO :** Agung Chornelis (Kabiro), Hari Sulistyo. **BONDOWOSO :** Rukwandanu. **BANYUWANGI :** Djoni DW (Kabiro), Suripto, Sugeng Purnomo. **JAWA TENGAH** : **BLORA :** Mugianto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. **REMBANG:** Didik Eko Sulistiwan. **WONOGIRI :** Heryanto. **SEMARANG RAYA :** Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. **PEKALONGAN RAYA :** Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. **BATANG :** Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. **KENDAL :** Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. **KUDUS :** Budi Setiawan. **GROBOGAN :** Heru Budianto. **SALATIGA :** Susilo Haryadi. **BOYOLALI** : Ahmad Mukhlis (Kabiro). **TEMANGGUNG :** Novan Argunanto. **JAWA BARAT : CILACAP :** Eko Prionggo Dewo, Suyatno. **MAGELANG:** Marno, ST. **BANDUNG :** Zaenal Ikhsan (Kabiro). **CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN :** Asep Sujana, Karsono. **SUMEDANG:** Ernawan Hidayat. **SUBANG :** Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. **INDRAMAYU :** Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. **DEPOK :** Harahap (Kabiro), Fajar. **BEKASI :** Abdul Rachman. **KUNINGAN:** Edwar Panata Muda. **PURWAKARTA:** Anthon Pontoh, Endin. **BOGOR :** Liswandi (Kabiro), Firdaus. **JAKARTA/BANTEN :** Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. **BALI :** Agung Wiarto. **SULAWESI SELATAN : SOPPENG/WAJO :** Anwar Paturusi (Kabiro)**. PINRANG**: Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. **BONE** : Edy Suspi AB. **JENEPONTO :** Aswin R. **SULAWESI UTARA :** Hilda Pusung. **MANADO**: Affandi Masloman. **KOTAMOBAGU/BMR** : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. **GORONTALO :** Rifly Tama'un. **SULAWESI BARAT :** Andi Firmansyah. **HALMAHERA SELATAN :** Anwar Suleman. **KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA**: Effendi (Kabiro). **KALIMANTAN BARAT** : Sofyan Hadi. **KETAPANG** : Sukarto. **KALIMANTAN UTARA** : Syamsudin (Kabiro). **KEPRI : BENGKALIS :** Agung Mulyono. **KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN**: Handoko **KEP NATUNA**: Amir Hamzah. **RIAU:** Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). **BENGKALIS/ROHIL :** Rusdi, SH. **SUMATERA SELATAN : PALEMBANG :** Yanthi Mahameru. **LAHAT/MUARA ENIM :** Adi Nurahman. **PAGAR ALAM** : Marleo Tanjung. **OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN :** M Azhary MY, **OKU TIMUR :** Nelis Sri Wahyuni. **OKI :** Nurlis Oktari. **SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN:** Muhammad Syafei Harahap. **LABUHANBATU :** M. Sukma (Kabiro). **PAKPAK BHARAT :** Tennang Tumangger (Kabiro), Dariono. **DELI SERDANG :** Heri Siswoyo. **ASAHAN :** Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Arnes, Faoziduhu Hulu. **NIAS UTARA** : Hadirat Syukur Harefa. **NIAS BARAT :** Odaligo Zai. **TAPANULI SELATAN** : Amir Hamzah Nasution. **BINJAI :** J. Saragih. **SUMATERA BARAT : PASAMAN:** Suryadarma (Kabiro), Refdinal. **LAMPUNG : WAY KANAN :** Arye M Jahri. **LAMPUNG TIMUR :** Nuhyin, Mueshin, Antoni. **LAMPUNG UTARA :** Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari **LAMPUNG SELATAN**: Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. **LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT :** M. Taufik **TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT** : Indra Wijaya, Hendra Jaya. **PRINGSEWU** : Iskandar. **BANDAR LAMPUNG :** Suhartono Hariwibowo. **TANGGAMUS :** - **NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES** : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. **SUBULUSSALAM** : Agus Darminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. **ACEH SINGKIL** :Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. **BIREUM :** Hendra S. **BANGKA BELITUNG:** Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. **JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT:** Joni Efendi. **TEBO :** Wendri Putra Rezky. **NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM**: Hidayatul Aini (Kabiro). **PAPUA :** Junjungan Silalahi. **LAYOUT/IT** Nur Hayati **PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN**: Dita Zahra Amalia. **PENERBIT** : PT Bidik Nasional Pers (BNP). **AKTE NOTARIS** : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. **SK MENKUMHAM** : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. **AKTE NOTARIS PERUBAHAN** : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. **SK MENKUMHAM PERUBAHAN** : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 **NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO:** 0220105231819. **NPWP**: 72.007.891.4-617.000. **ALAMAT** : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. **JAKARTA** : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. **BANK**: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. **WEBSITE** : https://bidiknasional.com.**Percetakan :** PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com
SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Ketua DPRD Jombang Apresiasi Kepastian Status PPPK Paruh Waktu

JOMBANG, BN – Beberapa pekan lalu Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lapangan Pemkab Kabupaten Jombang.

Dalam kegiatan tersebut telah menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian status dan hubungan kerja bagi para PPPK Paruh Waktu, sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan ruang pengabdian yang lebih baik bagi tenaga yang telah berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi atas terlaksananya proses tersebut. Ia mengatakan, keberadaan PPPK Paruh Waktu memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Jombang.

Inti dari perjanjian kerja PPPK adalah ikatan hukum tertulis antara warga Negara Indonesia yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah. **(Adv/Tok)**



Komisi C DPRD Jombang Tinjau Proyek Rehabilitasi Jalan Kemuning



Anggota Komisi C DPRD Jombang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek rehabilitasi Jalan Kemuning di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Senin (2/11).

JOMBANG, BN – Melalui Komisi C DPRD Jombang melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek rehabilitasi Jalan Kemuning di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Senin (2/11). Pada peninjauan lalu yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Jombang M Zahrul Jihad setelah menerima laporan masyarakat terkait kualitas pengerjaan jalan senilai Rp 1,16 miliar tersebut.

Ketika itu dari Komisi C, menilai kerusakan yang ditemukan masih dalam batas kewajaran, DPRD meminta kontraktor segera melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan. "Memang ada laporan dari masyarakat terkait pengerjaan Jalan Kemuning ini. Makanya, kami dari Komisi C turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan," ungkapnya.

Selain itu pada sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Jombang.

Sehingga pada pembangunan jalan yang menggunakan anggaran daerah yang harus dipastikan kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat.

"Kalau melihat kondisi di lapangan, kerusakan-kerusakan yang ada ini masih sangat wajar. Tetapi, bukan berarti kemudian dibiarkan. Tetap harus ada evaluasi terhadap hasil pekerjaan," ujarnya.

Bahwa Zahrul menyampaikan, meski proyek selesai dikerjakan, masih ada masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. ujarnya.

Saat itu juga dikatakannya, pihaknya meminta agar setiap kerusakan yang ditemukan segera diperbaiki. "Ini kan masih masa pemeliharaan. Jadi, kami meminta kerusakan-kerusakan yang ada segera dilakukan pembenahan. Jangan sampai nanti justru semakin parah dan akhirnya merugikan masyarakat," ungkapnya lagi.

Ditegaskan, Komisi C DPRD Jombang akan terus mengawal kualitas pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah daerah. Anggota Komisi tersebut mengatakan, proyek rehabilitasi jalan tidak cukup hanya selesai secara administrasi, tetapi juga harus benar-benar menghasilkan kondisi jalan yang baik dan layak digunakan.

"Kami ingin pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian. Apalagi ini menggunakan anggaran APBD," tandasnya. **(Adv/Tok)**

SMAN Jogoroto di Bawah Kepemimpinan Mu'alim Menginspirasi Warga Sekolah

JOMBANG, BN – Kepala sekolah berprestasi menunjukkan karakteristik seorang pemimpin masa depan yang sering diasosiasikan dengan pemimpin "emas". Istilah ini merujuk pada sosok kepala sekolah yang memiliki kompetensi luar biasa dalam mengelola lembaga pendidikan, sekaligus mampu menginspirasi seluruh warga sekolah demi mencapai kemajuan mutu pendidikan.

Hal tersebut dibuktikan oleh SMA Negeri Jogoroto, Jombang. Sekolah ini menunjukkan progres dan kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Mu'alim, S.Pd., M.Pd. Sejak menakhodai lembaga ini, ia berhasil membawa SMAN Jogoroto menorehkan berbagai pencapaian signifikan, mulai dari bidang akademik, non-akademik, peningkatan mutu fasilitas, hingga penguatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Kepemimpinan visioner seperti ini erat kaitannya dengan konsep persiapan "Generasi Emas". Dalam hal ini, kepala sekolah memegang peran krusial untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter kuat, serta memiliki daya saing global.

Kemajuan nyata ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut salah satu warga di lingkungan Kecamatan Jogoroto, dampak positif dari kepemimpinan yang baik ini sangat terasa di semua lini.

"Di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang baik, warga sekolah mulai dari guru, staf, siswa, hingga masyarakat sekitar merasakan dampak positif yang mencakup berbagai aspek kehidupan sekolah," ungkapnya. **(Tok)**



Mu' Alim Kepala Sekolah SMAN Jogoroto, Jombang. **(ist)**

Bapemperda DPRD Banyuwangi Inventarisir Usulan Raperda Propemperda Tahun 2027

BANYUWANGI, BN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi mulai inventarisir Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dalam pembahasan bersama jajaran eksekutif, tercatat sebanyak 28 judul rancangan peraturan daerah (Raperda) masuk dalam daftar usulan.

Pembahasan usulan Raperda tersebut dilakukan melalui rapat kerja Bapemperda bersama pihak eksekutif di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jumat (30/10/2026) siang.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ahmad Masrohan, menjelaskan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas inventarisasi dan pematangan usulan Propemperda 2027, dengan mayoritas Raperda usulan dari eksekutif.

"Agenda rapat kerja hari ini kita mengundanghadirkan Bagian Hukum bersama SKPD pengusul Raperda berkenaan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027," ungkap Ahmad Masrohan saat ditemui Awak Media di ruang kerjanya seusai rapat.

Ia menjelaskan, dari keseluruhan usulan Raperda yang dibahas, terdapat sekitar 25 judul Raperda dari usulan eksekutif dan sisa propemperda tahun ini yang belum terbahas, ditambah tiga Raperda komulatif Dengan demikian, total terdapat sekitar 28 Raperda yang masuk dalam daftar penyusunan Propemperda 2027.

Menurutnya, dari inventarisir tersebut, Raperda usulan eksekutif masih mendominasi. Sedangkan legislatif hanya mengusulkan sat raperda inisiatif dewan yakni Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan yang diajukan Fraksi Partai Demokrat.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Sempu tersebut menambahkan, seluruh usulan Raperda itu harus memenuhi syarat formil pengajuan Raperda dalam Propemperda diantaranya kelengkapan administrasi wajib seperti, Naskah Akademik (NA), Draf Raperda dan pemenuhan prosedur Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan oleh Kanwil Kemenhum sebelum dimasukkan ke dalam daftar Propemperda 2027. Proses pengusulan ditargetkan rampung paling lambat 4 November 2026.

Selain membahas agenda progarm legislasi tahun 2027, Bapemperda juga menyinggung sejumlah rancangan produk hukum daerah yang masih dalam proses pembahasan pada tahun ini.

Ia menyebutkan, beberapa Raperda yang masih dalam tahap pembahasan di Panitia khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi saat ini di antaranya berkaitan dengan Raperda Trantibum Linmas, Raperda penyelenggaraan pendidikan, Raperda pembentukan produk hukum daerah dan Raperda tentang penetapan desa.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan agenda pembentukan peraturan daerah ke depan berjalan lebih terarah, terukur, dan tidak sekadar memenuhi daftar program legislasi.

Ahmad Masrohan berharap, penyusunan Propemperda 2027 dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang, khususnya menyangkut kesiapan persyaratan formil setiap rancangan peraturan daerah.

"Harapannya ke depan ini kita lebih tertata lagi menjadi lebih baik, terutama kesiapan-kesiapan syarat formil. Kalau tahun 2027 pembahasannya bisa lebih awal, paling tidak harapannya usulan yang sudah masuk itu bisa terbahas," tegasnya.



Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ahmad Masrohan. **(ist)**

Ia menekankan, kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan sejak awal menjadi faktor penting agar pembahasan setiap Raperda tidak mengalami hambatan dalam proses legislasi.

Dengan target penyelesaian yang lebih optimal, Propemperda 2027 diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, tepat sasaran, serta menjawab kebutuhan masyarakat Banyuwangi. **(Dj/Rsl-BP)**

Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Bahas Raperda Bersama Akademisi dan Kemenhum

SIDOARJO, BN –Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan kemiskinan, pada Selasa (3/11/2026) siang. Rapat digelar di ruang rapat komisi lantai dua. Rapat dipimpin langsung oleh ketua komisi D, H. Dhamroni Khudlori didampingi anggota komisi D yaitu H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., Pratama Yudiarto, S.H., dan Wahyu Lumaksono, S.Pd.

Ini merupakan Raperda iniasiasi legilastif diproyeksikan sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan relevansi dan efektivitas penerapannya dalam upaya mengentas kemiskinan di Sidoarjo.

Rapat pembahasan Raperda kali ini memasuki tahap harmonisasi dipimpin Ketua Komisi D H. Dhamroni Chudlori didampingi wakilnya, Bangun Winarso dengan dihadiri Tim Kementerun Hukum RI. Juga dikuti Kabag. Hukum I Komang Ray Warmawan, dan pejabat dari unsur Beppeda serta Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo, berikut dari akdemisi, Dr Mahir, pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam rapat membedah pasal demi pasal dalam Raperda, terutama mendiskusikan muatan materi agar tidak bertentangan dengan UU atau peraturan berkedudukan lebih tinggi. Salah satunya terkait kewenangan pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan pendataan warga miskin sebagai sasaran atau obyek dalam program menanggulangi kemiskinan.

Merujuk UU nomor 13 Tahun 2011 bahwa kewenangan melakukan pendataan dan pengelolaan warga miskin adalah kewenangan pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hanya saja yang menjadi persoalan data hasil pendataan, seperti merujuk hasil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih berpolemik masyarakat, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Begitu pula dalam penyaluran beberapa program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berupa uang tunai, maupun bantuan sembako telah menyisahkan persoalan di lapangan.

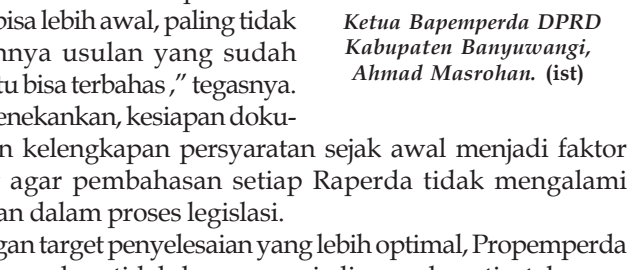
Menurut Gus Dham, sapaan ketua Komisi D bahwa fenomena persoalan yang muncul karena masih ada kasus penyaluran bantuan warga miskin kurang tepat sasaran. "Itu juga terjadi di Sidoarjo. Banyak warga semestinya berhak bantuan berdasarkan fakta di lapangan, tapi tidak tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, ada warga yang semestinya tidak berhak, tetapi mereka mendapatkan bantuan itu," ujarnya.

Ironisnya, menyikapi persoalan, pihak pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan merubah data. Kata lain yang bisa dilakukan hanya mengusulkan sebagai data tambahan, namun itu pun tidak pernah difollow up oleh pusat. Sehingga data tambahan itu pun tidak ada artinya, hanya menjadi sebuah catatan di kertas saja. "Terbukti banyak warga yang faktanya masuk ketegori tidak mampu tetap tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Dan selama ini tidak pernah menerima bantuan, itu jumlah banyak," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Gus Dham, pihaknya menilai pentingnya adanya pasal di Raperda yang mengatur kewenangan Pemkab Sidoarjo melakukan mendataan warga miskin sesuai fakta di lapangan. Meski tidak bisa mengubah data pusat, namun dinilai urgen sebagai pendamping sekaligus dapat menjadi acuan pelaksanaan program bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

"Bantuan itu bisa dari pusat, provinsi dan kabupaten. Nah, melalui data yang kita buat, apakah sebagai pendamping tentunya bisa disisir mana warga miskin yang berhak tapi belum mendapatkan bantuan, bisa dicover melalui program pengentasan kemiskinan dengan anggaran APBD," tegasnya.

Dalam Raperda ini, Gus Dham maupun Bangun Winarso menambahkan materi yang termuat di pasal demi pasal akan mengatur lebih konkret dan tegas terkait tugas dan kewenangan Pemkab Sidoarjo dalam menanggulangin kemiskinan. "Meski terjadi penurunan, angka kemiskinan Sidoarjo masih tercatat 4,38 persen," ujarnya.



Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo bahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan kemiskinan. (yah)

Namun seiring pula dengan nilai ekonomi yang meningkat, diproyeksikan angka kemiskinan cenderung bertambah. Analoginya, jika sebelumnya berpenghasilan Rp 600 ribu perbulan baru masuk ketegori warga kurang mampu. "Tetapi sekarang berpenghasilan rata-rata Rp 2,6 juta itu termasuk ketegori kurang mampu. Karena dari UMK saja sudah di atas Rp 4 juta," ucapnya.

Untuk itulah, pihak menilai pentingnya dilakukan perubahan Perda lama, sebagai penggantinya adalah Raperda yang tengah dibahas ini merupakan kebutuhan relevansi dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, serta sebagai penyesuaian UU dan peraturan yang berlaku sekarang.

(Yah)

Bupati Pamekasan Lantik 9 Pejabat Administrator, Tekankan Pengawasan dan Pelayanan Publik

PAMEKASAN, BN - Bupati Pamekasan Kholilurrahman, meminta pejabat administrator yang baru dilantik memperkuat kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik saat melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap pejabat Administrator di lingkungan pemerintqh kabupaten Pamekasan, bertempat di Pringgitan dalam Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Senin (2/11/2026).



Bupati Pamekasan Kholilurrahman saat melantik 9 Pejabat Administrator. **(ist)**

Bupati menyampaikan, jabatan yang diemban bukan sekadar peningkatan karier, melainkan amanah dengan tanggungjawab yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata. "Jabatan administrator memiliki posisi yang sangat strategis. Saudara bukan hanya pelaksana kebijakan pimpinan, tetapi juga penggerak organisasi, pengendali pelaksanaan tugas, pembina bawahan, sekaligus penanggung jawab pencapaian kinerja pada unit kerja masing-masing," tegasnya.

Dia meminta para pejabat menjalankan tugas secara profesional, dan memahami bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab pengabdian. "Karena itu, kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dijawab dengan hasil kerja, bukan sekadar janji maupun laporan administratif," pungkasnya. **(kholis)**

Bupati Pamekasan Raih Dua Penghargaan Wilwatikta Award 2026


Bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman, SH, Msi.

PAMEKASAN, BN - Bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman, SH, Msi meraih dua penghargaan Wilwatikta Awards tahun 2026 yang di selenggarakan oleh Jawa Pos Multimedia yang bertempat di Legacy Bailroom, Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya Jumat (30/10/2026). Dua penghargaan tersebut diberikan untuk kategori pengawasan pengentasan kemiskinan, serta inisiatif pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

Bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman, SH, Msi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dan berkonstribusi terhadap capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan. "Terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam memajukan Pamekasan. Ini kita raih berkat kerja keras semuanya, termasuk Masyarakat," kata bupati Pamekasan saat ditemui di peringgitan dalam pendopo Ronggosukowati, Pamekasan Senin, (2/11/2026).

Kholilurrahman juga berharap capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan capaian yang telah diperoleh tersebut menjadi motivasi untuk memperkuat pembangunan daerah sehingga kabupaten Pamekasan tambah maju, tambah berkualitas dan berintegritas. "Pamekasan kedepan harus lebih baik, lebih tertata, dan lebih mempunyai integritas yang tinggi," pungkasnya. **(kholis)**

DKP, AJP dan KNPI Pamekasan Gelar Sarasehan Budaya

PAMEKASAN, BN - Dewan Kesenian Pamekasan (DKP) bersama Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan menggelar Sarasehan Budaya sekaligus Temu Tokoh Pemuda dan Budayawan Madura, Rabu malam (28/10/2026).


Sarasehan Budaya sekaligus Temu Tokoh Pemuda dan Budayawan Madura, Rabu malam (28/10/2026).

Sejumlah tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Syafii Kamil, tokoh diaspora Belanda asal Plakpak Pamekasan; Bambang Oeban, budayawan nasional; RBMS Hadinatainngrat, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara; Ita Kusmita, anggota Komisi I DPRD Pamekasan; Noer Faizal dari DPD KNPI Jawa Timur; R. Harisandi S. Pratalikrama anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara; serta RB. Deny F. Suryoningprang, Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara.

Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto, Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat, dan Dandim 0826 Pamekasan Letkol Kav. Agus Wibowo.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan, tersebut digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan mengangkat tema "Dari M. Tabrani untuk Indonesia".

Ketua DKP Pamekasan Arief Wibisono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan. Menurutnya, sosok M. Tabrani memiliki nilai historis yang patut diteladani, terutama dalam memperjuangkan identitas kebangsaan melalui gagasan Bahasa Indonesia.

Arief juga mengajak generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan M. Tabrani. Ia berharap pemuda tidak hanya mengenal tokoh tersebut melalui catatan sejarah, tetapi juga mampu menerapkan nilai perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Ketua AJP Pamekasan M. Khairul Umam berharap semangat M. Tabrani dapat menginspirasi generasi muda untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Menurut Khairul Umam, peringatan Sumpah Pemuda semestinya menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan sekaligus mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan. Semangat perjuangan para pendahulu perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua KNPI Pamekasan Haidar Ansori juga mendorong pemuda agar terlibat aktif dalam berbagai perkembangan lintas sektor. Ia menilai, generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

(kholis)

Angka Kemiskinan di Sumenep Menurun


Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto. **(ist)**

SUMENEP, BN - Kabupaten Sumenep penduduk miskin ada penurunan dari semula 17,02 persen pada tahun 2025 menjadi 16,42 persen di tahun 2026. Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan program penanggulangan kemiskinan Pemkab Sumenep mulai memberikan dampak perbaikan kepada masyarakat.

Sumenep Arif Firmanto (Ka Bapedda) bahwa penurunan persentase penduduk miskin pada 2026 merupakan capaian positif yang menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai memberikan dampak. Persentase tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sebesar 16,44 persen kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 2,18 pada 2025 menjadi 2,84 pada 2026 serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,47 menjadi 0,75 menunjukkan kondisi ekonomi sebagian penduduk miskin masih membutuhkan perhatian.

Strategi dijalankan melalui tiga pendekatan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui bantuan sosial, bantuan pangan, jaminan kesehatan, beasiswa, dan perlindungan kelompok rentan.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, bantuan sarana produksi pertanian dan perikanan, akses permodalan, bursa kerja, serta program padat karya.

Ketiga, mengurangi kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, seperti jalan, jembatan, air minum, sanitasi, rehabilitasi rumah, serta subsidi transportasi kepulauan.

Dalam artian meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, masih terdapat kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya cukup rentan dan membutuhkan perhatian serta intervensi yang lebih intensif untuk meningkatkan dari tahun 2025, kedua indeks tersebut masih lebih rendah dibandingkan 2023. Saat itu, P1 tercatat sebesar 4,50 dan P2 mencapai 1,42.

Untuk itu menegaskan penanggulangan kemiskinan kedepan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kita tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat yang masih miskin memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,'' kata ArifF irmanto

Lanjut Arif Firmanto berdasarkan data BPS, garis kemiskinan Sumenep pada 2026 tercatat sebesar Rp582.282 per kapita per bulan. Karena itu, intervensi diarahkan pada kelompok masyarakat yang berada di sekitar garis kemisk Dalam pelaksanaannya, program tersebut akan memprioritaskan kelompok rentan dan masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan, seperti buruh tani, nelayan, pekerja informal, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta rumah tangga berpeng hasilan rendah.

(yus)

DPMPTSP Kabupaten Madiun Beri Anugerah Kepatuhan Investasi 2026

MADIUN, BN – Pemerintah Kabupaten Madiun terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Anugerah Kepatuhan Investasi 2026, yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kayana Ballroom, Votel Kartika Madiun, Selasa (27/10/2026).



Acara Anugerah Kepatuhan Investasi 2026. **(bas)**

Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan yang dinilai konsisten memenuhi ketentuan dan regulasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Acara dihadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah, sejumlah OPD terkait, kalangan dunia usaha dan tamu undangan lain.

Pada kesempatan itu, Kepala DPMPTSP Anang Solistijono Selaku penyelenggara dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Anugerah Kepatuhan Investasi ini merupakan bentuk penghargaan dan motivasi dari Pemkab. Madiun kepada para pelaku usaha yang tertib dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal, memiliki perizinan yang lengkap, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Madiun.

"Anugerah ini kami berikan sebagai bentuk terima kasih. Semakin patuh pengusaha dalam perizinan dan pelaporan, maka iklim investasi di Kabupaten Madiun akan semakin sehat, transparan, dan berdaya saing. Penilaian ini didasarkan tujuh indikator, yakni kepatuhan penyampaian laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pembayaran pajak dan retribusi, pengelolaan lingkungan hidup, tenaga kerja, kesertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, kemitraan dengan pelaku usaha serta mitigasi bencana kebakaran", ujarnya.

Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, mengawali sambutannya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh investor yang telah memilih Kab Madiun sebagai tempat berinvestasi.

Ia menegaskan, komitmen Pemkab untuk terus memberikan kemudahan, pelayanan, yang cepat dan kepastian hukum bagi para investor melalui pelayanan di Mal Pelayanan Publik dan Sistem Online Single Submission (OSS).

"Investasi adalah motor penggerak ekonomi daerah. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Kepatuhan Anda adalah kontribusi besar bagi pembangunan Kab Madiun. Kami berkomitmen untuk tidak mempersulit, tapi mempermudah investasi. Mari kita bangun Madiun yang lebih sejahtera bersama" tegas wabup.

"Saya minta DPMPTSP terus melakukan pendampingan, jangan sampai ada investor yang merasa kesulitan mengurus izin. Pelayanan harus pro-akti, jemput bola," imbuhnya.

Capaian realisasi investasi Kabupaten Madiun tahun 2026 sampai triwulan lll adalah mencapai 90 persen, dari target yang ditetapkan Rp 3 triliun. Pemerintah optimis dengan adanya Kepatuhan pelaku usaha dan sinergi bersama target tersebut dapat tercapai.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan realisasi investasi di Kabupaten Madiun tahun 2026 semakin meningkat dan target dapat tercapai, serta terciptanya iklim investasi yang kondusif, berkeadilan,dan berkelanjutan", tambahnya.

Daftar Penerima Anugrah Kepatuhan Investasi Kabupaten Madiun Tahun 2026

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
1.Peringkat Terbaik I : CV. Pangan Artha Sejahtera.
2.Peringkat Terbaik ll : PT. Sumber Alfaria Trijaya.
3.Peringkat Terbaik lll : PT. Charoen Pokphand Indonesia.
4.Peringkat Harapan l : PT. INKA Multi Solusi.
5.Peringkat Harapan ll : PT. Sreeya Sewu Indonesia.
6.Peringkat Harapan lll : PT. Sinergi Gula Nusantara.

Penanaman Modal Asing (PMA)
1.Peringkat Terbaik l : PT. Global Way Indonesia.
2.Peringkat Terbaik ll : PT. Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri.
3.Peringkat Terbaik lll : PT. Dwi Prima Sentosa.
4.Peringkat Harapan l : PT. Sintec Industri Indonesia.
5.Peringkat Harapan ll : PT. Newstar Konjac Nusantara.

(ADV/Bas)

Kegiatan Parenting Wali Murid Kelas VII SMP Negeri 1 Gampengrejo 2026, Sinergi Kuat Wujudkan Generasi Berkarakter



KEDIRI, BN – Pendidikan berkualitas tidak hanya lahir dari ruang kelas, melainkan dari kolaborasi erat antara rumah dan sekolah. Komitmen ini tercermin dalam kegiatan Parenting Wali Murid Kelas VII SMP Negeri 1 Gampengrejo yang sukses digelar pada hari Selasa, 3 November 2026.

Acara yang berlangsung di lingkungan sekolah ini mengusung tema "Sinergi Orang Tua dan Sekolah Menuju Murid Berkarakter". Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pihak sekolah, dewan guru, serta ratusan orang tua atau wali murid kelas VII.

Membangun Kolaborasi Demi Tumbuh Kembang Anak

Dalam sambutannya, pihak manajemen SMP Negeri 1 Gampengrejo menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam mendampingi proses belajar dan tumbuh kembang anak, terutama di masa transisi dari tingkat sekolah dasar ke jenjang menengah pertama.

"Anak-anak hebat tidak tumbuh sendirian. Mereka membutuhkan kasih sayang keluarga, bimbingan guru, serta lingkungan yang mendukung untuk berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan berintegritas," ujar perwakilan pihak sekolah dalam acara tersebut.

Melalui kegiatan parenting ini, para orang tua diajak untuk menyatukan langkah dan menyamakan persepsi mengenai pola pengasuhan di era modern. Kolaborasi yang harmonis dinilai menjadi kunci utama untuk membentengi anak-anak dari pengaruh negatif serta mengarahkan potensi mereka secara optimal.

Rumah Sebagai Sekolah Pertama

Poin penting yang digarisbawahi dalam pertemuan ini adalah pengingat bahwa rumah adalah sekolah pertama, sedangkan sekolah adalah mitra terbaik keluarga dalam membentuk masa depan anak. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan guru menjadi jembatan utama agar perkembangan akademik maupun karakter siswa dapat terpantau dengan baik. **(ND)**

Proyek Pokir DPRD Pekalongan Rp140 Juta Disorot, Kontraktor & PUPR Bungkam



Proyek pemeliharaan jalan dan jembatan senilai Rp140 juta yang bersumber dari dana Pokir DPRD Kabupaten Pekalongan TA 2026 menggunakan papan kayu yang diduga bekas, retak, dan pecah. **(ist)**

PEKALONGAN, BN – Proyek pemeliharaan jembatan di Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan memicu polemik. Infrastruktur yang didanai melalui APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp140 juta tersebut disorot lantaran kedapatan menggunakan material papan kayu yang diduga bekas, retak-retak, hingga pecah.

Berdasarkan data papan informasi proyek, pekerjaan ini bersumber dari aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dikerjakan oleh CV Pahala. Masa pelaksanaan proyek dijadwalkan selama 75 hari kalender, terhitung sejak 5 Agustus hingga 18 Oktober 2026.

Namun, alih-alih memberikan fasilitas yang kokoh, hasil akhir pekerjaan visual di lapangan justru memicu kekhawatiran warga terkait faktor keselamatan dan potensi kerugian negara.

Pantauan di lokasi menunjukkan kejanggalan pada komponen utama lantai jembatan. Sejumlah papan kayu yang dipasang tidak tampak seperti material baru. Beberapa di antaranya mengalami keretakan memanjang yang cukup parah, bahkan ada bagian yang sudah pecah sebelum jembatan sempat digunakan secara optimal oleh warga.

Kondisi infrastruktur yang terkesan dipaksakan ini dinilai membahayakan, mengingat jembatan tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas harian dan perputaran ekonomi masyarakat Desa Depok.

Saat dikonfirmasi via telepon pada Rabu (21/10/2026), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, membenarkan bahwa proyek tersebut merupakan pengawalan aspirasi dari dirinya atas permintaan masyarakat. Kendati demikian, Sumar enggan masuk ke dalam ranah teknis pelaksanaan dan mengaku tidak mengetahui siapa kontraktor di balik proyek tersebut.

"Mengenai persoalan teknis pekerjaan, silakan langsung ke dinas terkait. Saya tidak mengetahui secara pasti pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut," dalih Sumar.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Depok menegaskan posisi mereka yang bersih dari intervensi anggaran proyek ini. Salah satu perangkat desa setempat menyatakan bahwa pemeliharaan jembatan tersebut murni proyek dari luar yang dibawa oleh pihak ketiga (kontraktor) atas restu anggota dewan.

LSM LAPPAS RI Desak Transparansi Kontrak dan Audit BPK

Menyikapi temuan ini, Zaenuri dari LSM LAPPAS RI melayangkan kritik keras atas lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait. Ia menuntut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pekalongan membuka dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga gambar teknis ke publik.

"Dinas PUPR wajib menjelaskan secara terbuka spesifikasi material, volume pekerjaan, hingga metode pemasangannya. Apakah kondisi kayu retak dan diduga bekas seperti itu memang masuk dalam spesifikasi dokumen kontrak atau tidak?" tegas Zaenuri saat diwawancarai awak media.

Lebih lanjut, Zaenuri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Daerah segera turun tangan melakukan audit investigatif guna memeriksa indikasi markup anggaran.

"Transparansi ini penting. Penilaian kualitas jangan hanya dari visual, tapi dicocokkan dengan nilai kontrak Rp140 juta. Jika ada ketidaksesuaian atau indikasi korupsi, penegak hukum harus bertindak," imbuhnya.

Untuk diketahui, upaya konfirmasi awak media kepada Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan serta manajemen CV Pahala belum mendapat respons.

Kedua pihak terkait belum memberikan tanggapan ataupun keterangan teknis yang dapat diverifikasi terkait dugaan amburadulnya proyek jembatan tersebut. Ikuti informasi selanjutnya pada edisi berikutnya. **(dikin)**

Normalisasi Anak Sungai Citapen Kota Banjar Kurangi Risiko Banjir



KOTA BANJAR, BN – Upaya menjaga fungsi aliran sungai terus dilakukan melalui kegiatan normalisasi Anak Sungai Citapen, yang merupakan anak Sungai Cijolang, di kawasan Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan melalui BBWS Citanduy, Satker SDA OP 3, dengan PPK Bu Wulan ini diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air dan mengurangi potensi banjir di kawasan sekitar.

Berdasarkan pantauan visual di lapangan pada Minggu (18/10/2026), alat berat terlihat melakukan pekerjaan penataan alur sungai. Sejumlah bagian tebing tampak mengalami penanganan, sementara alur sungai terlihat terbuka di antara kedua sisi tebing.

Normalisasi sungai pada prinsipnya bertujuan menjaga kapasitas alur agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air. Penanganannya dapat meliputi pengangkatan sedimentasi, penataan alur, dan pembentukan tebing sesuai perencanaan teknis. Namun, besarnya manfaat pekerjaan terhadap pengurangan risiko banjir tetap bergantung pada kondisi sungai, kapasitas aliran, curah hujan, serta sistem drainase di kawasan sekitarnya.

Pengusaha asal Kota Banjar, Aris, menyampaikan harapannya agar kegiatan normalisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kelancaran aliran air saat debit sungai meningkat.

"Dengan adanya normalisasi ini, kita berharap aliran air sungai bisa lebih lancar dan sedimentasi yang menghambat aliran dapat ditangani. Mudah-mudahan pekerjaan ini memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu mengurangi risiko banjir di lingkungan sekitar," kata Aris.

Ia juga berharap pelaksanaan pekerjaan memperhatikan aspek teknis dan kualitas hasilnya sehingga fungsi sungai dapat terjaga dalam jangka panjang.

Menurutnya, pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan sungai berjalan sesuai perencanaan dan kondisi lapangan.

Apresiasi juga disampaikan Dedi, salah seorang warga di sekitar lokasi. Ia mengucapkan terima kasih kepada BBWS Citanduy melalui Satker SDA OP 3, khususnya PPK Bu Wulan, atas pelaksanaan kegiatan normalisasi Anak Sungai Citapen.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BBWS Citanduy, Satker SDA OP 3, khususnya Ibu Wulan selaku PPK, yang telah melaksanakan kegiatan normalisasi sungai ini. Kami berharap pekerjaan ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kelancaran aliran air dan mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman banjir," ungkap Dedi.

Ia berharap pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya, khususnya ketika musim hujan tiba dan debit air sungai meningkat.

Selain menjaga kelancaran aliran air, pekerjaan normalisasi perlu memperhatikan kestabilan tebing, dimensi alur, serta kesesuaian pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi teknis. Penanganan tebing juga perlu disesuaikan dengan kondisi tanah dan karakteristik aliran agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Pengawasan dari petugas terkait menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan. Setelah pekerjaan selesai, pemeliharaan sungai juga diperlukan agar sedimentasi dan hambatan aliran tidak kembali mengurangi fungsi sungai.

Masyarakat berharap BBWS Citanduy melalui Satker SDA OP 3 dapat terus melakukan penanganan sungai berdasarkan kebutuhan teknis dan kondisi lapangan.

Dengan adanya normalisasi Anak Sungai Citapen ini, diharapkan fungsi sungai dapat terpelihara, aliran air menjadi lebih optimal, dan potensi dampak banjir terhadap lingkungan sekitar dapat diminimalkan. **(Asep sujana)**

Ade Surahman Anggota BPD Terpilih Tanjungsari Pertanyakan Kepastian Pelantikan



KAB. BANDUNG, BN – Polemik pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, belum menemukan titik terang. Ade Surahman, anggota BPD terpilih untuk periode 2026–2034, mendesak agar hasil pemilihan yang telah ditetapkan panitia segera ditindaklanjuti dengan proses peresmian dan pelantikan.

Ade mengungkapkan, hingga saat ini belum ada keputusan yang disepakati meskipun sejumlah pertemuan telah dilakukan untuk membahas keberatan terhadap hasil pemilihan anggota BPD Desa Tanjungsari.

Menurut Ade, persoalan tersebut semakin mendesak karena masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya telah berakhir pada 18 Oktober 2026. Kondisi itu, kata dia, menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan BPD di Desa Tanjungsari.

"Sudah tiga kali pertemuan, tetapi belum ada titik temu. Bahkan, dalam pertemuan terakhir di kecamatan,

■ **Bersambung ke hal.11 kol.5**

Sedekah Bumi Desa Waringinsari Meriah, Kades Apresiasi Partisipasi dan Gotong Royong Warga



Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriana, M.Pd. **(asep)**

KOTA BANJAR, BN – Tradisi Sedekah Bumi di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, berlangsung meriah melalui rangkaian kirab budaya dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan tradisi budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (28/6/2025) tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriana, M.Pd.

Kemeriahan kirab budaya menjadi salah satu daya tarik kegiatan. Partisipasi masyarakat mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Kepala Desa Waringinsari menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Waringinsari yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara ini. Kebersamaan dan gotong royong masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian tradisi Sedekah Bumi," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga mampu memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya lokal.

Sedekah Bumi merupakan tradisi yang di berbagai daerah dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan hasil bumi. Selain memiliki nilai budaya, tradisi ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Rangkaian doa bersama dalam kegiatan tersebut turut memberikan nuansa religius dalam menyambut Tahun Baru Islam, sementara kirab budaya menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam mempertahankan identitas lokal.

Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Waringinsari diharapkan terus menjaga kekompakan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman.

Kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi modal penting untuk mempertahankan tradisi sekaligus memperkuat kehidupan sosial yang harmonis di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

(Asep sujana)

BDSF 2026, Pers Didorong Berperan Aktif Cegah Kejahatan Digital Berbasis AI



Ketua PWI Jabar memberikan penghargaan kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebagai salah satu kepala daerah yang aktif dalam transformasi digital Tatakelola pemerintahan yang diwakili pihak Diskominfo Kota Bandung **(ist)**

BANDUNG, BN – Pers didorong mengambil peran aktif dalam mencegah kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), terutama penipuan yang memanfaatkan tiruan wajah dan suara.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, menegaskan jurnalis tidak cukup hanya memberitakan kasus, tetapi juga harus mengedukasi masyarakat dan memastikan akurasi informasi di tengah maraknya manipulasi digital dan hoaks.

Penegasan itu disampaikan Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).

Forum tersebut digagas PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) untuk memperkuat literasi, perlindungan, dan kepercayaan publik di ruang digital.

Menurut Tantan, perkembangan AI membawa tantangan baru bagi keamanan masyarakat. Teknologi yang mampu meniru identitas seseorang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan penipuan dengan cara yang semakin sulit dikenali.

aman di Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi

■ **Bersambung ke hal.11 kol.1**

Porwanas 2027, DPRD Dukung Kontingen Jabar Rebut Kembali Gelar Juara Umum



BANDUNG, BN – Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 yang akan berlangsung di Lampung pada 5-10 April 2027, Komisi V DPRD Jawa Barat mendukung penuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk merebut kembali gelar juara umum.

Hal itu terungkap saat Komisi V DPRD Jabar menerima audiensi pengurus PWI Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).

Ditegaskan Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, secara prinsip DPRD Jabar mendukung

■ **Bersambung ke hal.11 kol.1**

Bupati Warsubi Beri Sambutan Pembukaan UMKM Expo Jombang Fest 2026

JOMBANG, BN – Pada Puncak perayaan Hari Jadi ke-116 Kabupaten Jombang dimulai meriah. Puluhan pelaku UMKM lokal unjuk gigi dalam gelaran UMKM Expo Jombang Fest 2026 di Alun-Alun Jombang, Selasa (20/10/2026). Menjadi momentum tersendiri, dan memiliki makna mendalam yang lebih dari sekedar pesta atau seremonial, yang masih membekas dan masih mengingat di setiap ingatan.

Pada acara Expo yang sudah berlangsung selama lima hari hingga 24 Oktober 2026 ini resmi dibuka Bupati Jombang, Warsubi, ditandai dengan pemotongan pita.

Selain itu juga mendampingi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid beserta istri, jajaran Forkopimda dan Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi.

Selanjutnya pada acara tersebut, Bupati Warsubi menyebut expo ini bukan sekadar pameran, tapi etalase kebangkitan ekonomi wong Jombang.

"Total ada 100 tenant. 80 tenant produk unggulan UMKM dan 20 tenant kuliner di area PASARASA. Ini kesempatan emas pelaku usaha kita untuk naik kelas," kata Bupati Warsubi.

Bupati Jombang menyampaikan, momentum Hari Jadi ke-116 harus dimanfaatkan untuk mendorong perputaran ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh warga Jombang untuk datang dan berbelanja langsung produk lokal.

"Monggo, ajak keluarga, teman, dan saudara meramaikan Alun-Alun. Beli produknya, dukung UMKM kita biar makin semangat berkarya," ujar nya.

Acara tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, Tetapi bisa menjadi simbol Pemerintah Kabupaten Jombang ditengah pelaku UMKM yang setiap hari bekerja keras menghidupi keluarga keluarga, sekaligus menggerakkan roda perekonomian bangsa.

(Tok/Adv)



Bupati Jombang, Warsubi saat membuka UMKM Expo Jombang Fest 2026 di Alun-Alun Jombang. **(ist)**

Bupati Warsubi Temui Pasien Operasi Katarak Gratis di RSUD Ploso

JOMBANG, BN – RSUD Ploso Sukses Menggelar Operasi Katarak (24/10/2026). Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis tersebut, dihadiri langsung Bupati Jombang Warsubi ini diikuti sebanyak 116 pasien yang ditangani langsung oleh 16 dokter spesialis mata.

Pada program bakti sosial terlaksana atas kolaborasi Pemkab Jombang melalui RSUD Ploso, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), serta Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) sebagai bentuk sinergi nyata dalam pelayanan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.

Direktur RSUD Ploso, Muhammad Vidya Buana, menyampaikan syukur atas kelancaran seluruh tindakan operasi yang diselesaikan dalam satu hari. Panitia menyiapkan 6 meja layanan. Satu pasien rata-rata menjalani proses operasi sekitar 20 menit.



Bupati Jombang Warsubi melihat langsung Operasi Katarak di RSUD Ploso. **(Ist)**

"Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Operasi seluruh pasien sebanyak 116 orang diselesaikan langsung hari ini dengan melibatkan 16 dokter spesialis mata. Pascaoperasi juga akan ada jadwal kontrol berkala di RSUD Ploso, dan semuanya gratis," tutur dr. Vidya Buana.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Abah Warsubi menegaskan keterbatasan biaya tidak boleh menjadi penghalang warga untuk mendapatkan hak hidup sehat dan penglihatan layak.

"Jangan sampai keterbatasan biaya membuat masyarakat menunda pengobatan dan terlalu lama mengalami gangguan penglihatan yang sebenarnya dapat ditangani melalui pelayanan medis yang tepat. Penglihatan yang baik adalah kunci agar seseorang dapat kembali mandiri, bekerja lebih produktif, dan meningkatkan kualitas hidupnya," tegas Bupati Jombang.

Bupati berharap kolaborasi antara rumah sakit, organisasi profesi, lembaga sosial, dan pemerintah terus diperkuat. Sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses pelayanan kesehatan, termasuk warga yang selama ini menghadapi keterbatasan untuk mendapatkan tindakan medis.

"Mari kita terus perkuat pelayanan kesehatan di Kabupaten Jombang agar semakin mudah dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, masyarakat yang sehat merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk semua," tandas Bupati Warsubi.

Atas nama Pemkab Jombang, Bupati Warsubi menyampaikan terima kasih kepada RSUD Ploso, PERDAMI, AMCF, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Semoga setiap upaya yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan ini dilakukan mencerminkan kolaborasi antar RSUD Ploso dengan Pemkab Jombang untuk saling membantu sesame. Masyarakat sangat antusias sekali, bahkan mereka bisa melihat secara jelas, yang sebelumnya tergantung pada anggota keluarga, kini dapat kembali beraktivitas, bekerja dan menjalani hidup secara mandiri. **(Tok/Adv)**

Bupati Warsubi Antusias Buka Gelaran Spektakuler Ringin Contong Carnival 2026



Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si, saat memberi sambutan pembukaan Ringin Contong Carnival 2026. **(ist)**

JOMBANG, BN - Menghadirkan suasana magis dengan kerlap kerlip lampu, parade warna- warni alunan musik, serta kebersamaan yang membekas sebagai kenangan indah pertunjukan Ringin Contong Carnival (RCC) 2026. Pemerintah Kabupaten Jombang sukses menggelar ajang bergengsi RCC 2026 (Sabtu 17/10/2026) malam hari. Saat itu di panggung utama berada di kawasan ikonik Ringin Contong Jombang, perhelatan tahunan yang memasuki kali kedua ini dibuka secara resmi oleh Bupati Jombang Warsubi, SH., M.Si.

Antusiasme masyarakat sangat luar biasa, baik yang menyaksikan secara langsung di sepanjang rute parade maupun yang mengikuti jalannya acara melalui siaran live streaming di kanal YouTube Jombangkab.

Di penghujung kemeriahan, menunjukkan keagungan Ringin Contong Carnival 2026 ini semakin nampak megah dan sakral, cukup memukau lewat penampilan Tarian Sakral Bedoyo Kum Kum serta lantunan indah Sinden Sendang Made.

Ketika dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan rasa syukur serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini, mulai dari Disporapar Kabupaten Jombang, panitia penyelenggara, komunitas seni, para desainer, sponsor, hingga antusiasme masyarakat Jombang yang hadir memadati Lokasi acara.

"Syukur Alhamdulillah, atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia Allah SWT, kita semua dapat hadir bersama pada acara Ringin Contong Carnival 2026, dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan, baik dari Kabupaten Jombang maupun dari berbagai daerah lainnya. Saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jombang atas kehadiran dan antusiasme yang luar biasa dalam menyaksikan Ringin Contong Carnival 2026," ujar Bupati Warsubi.

Perayaan gelaran tahun ini, Ringin Contong Carnival mengangkat tema BASKARA (Bingkai Asal-usul, Sejarah Keberagaman/ Kebudayaan, Agama, dan Ragam Adiluhung) dengan subtema Warisan Peradaban dan Pesona Wonosalam. Tema ini dirancang untuk menggugah rasa cinta daerah sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru dari para generasi muda.

"Tema ini mengajak kita untuk mengenali kembali akar budaya dan sejarah yang membentuk identitas daerah, kemudian meneruskannya melalui karya-karya kreatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya berharap, generasi muda Jombang semakin berani mengeksplorasi kekayaan lokal, mengolahnya menjadi karya yang inovatif, serta memperkenalkannya kepada masyarakat luas, agar warisan leluhur tetap dikenal, dihargai, dan diteruskan oleh generasi berikutnya," ujar Bupati Jombang Warsubi.

Pada pertunjukan megah tersebut, satu momen istimewa dalam RCC 2026 adalah hadirnya Special Performance: Artwear yang menampilkan karya-karya orisinal dari desainer berbakat asli Jombang serta para pelajar. Bupati menegaskan bahwa RCC terus diarahkan menjadi wadah pertumbuhan ekonomi kreatif daerah yang inklusif sekaligus tumbuh menjadi kebanggaan masyarakat dan membawa nama Kabupaten Jombang semakin dikenal di tingkat nasional.

"Kami juga berharap, RCC terus berkembang sebagai wadah bagi tumbuhnya ekonomi kreatif daerah. Ke depan, kita juga menargetkan agar Ringin Contong Carnival dapat masuk dalam kurasi Karisma Event Nusantara (KEN). Sehingga untuk mewujudkan target tersebut, kita perlu terus meningkatkan kualitas penyelengaraan, memperkuat keunikan budaya, memperluas promosi, dan membangun kolaborasi, dengan tetap memperhatikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Selain untuk mewujudkan target masuk dalam KEN, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk saling memperkuat kolaborasi. Mengakhiri sambutannya, Bupati meresmikan pembukaan acara dengan penuh semangat dan optimisme.

Semoga mendapatkan ridho Allah SWT, 'Bismillahirrahmannirrahim', Ringin Contong Carnival 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ringin Contong Carnival: Kreativitas Mendunia, Kebanggaan Jombang!" ujar Bupati Warsubi.

Pada Pagelaran Ringin Contong Carnival 2026 menyajikan parade visual luar biasa yang diikuti oleh 20 kontingen artwear, 44 kategori individu, 6 kategori kelompok, serta 8 kategori undangan. Para peserta menempuh rute yang dimulai dari titik keberangkatan di Kodim 0814 Jombang, melintasi panggung utama di kawasan Ringin Contong, dan mengakhiri parade di garis finish Stadion Merdeka Jombang.

Selanjutnya pada panggung runway dimeriahkan oleh deretan penampilan memukau dari Desainer SMKN 2 Jombang, Desainer Jombang, SMK Kreatif Hasbullah Tambakberas, SMAN 2 Jombang, Sanggar Amerta Nagari, SMK PGRI 1 Jombang, Karang Taruna Gema Pemuda, hingga pertunjukan dari peserta kategori Warisan Peradaban dan pesona Wonosalam. Kemeriahan juga ditunjukkan melalui partisipasi kontingen undangan dari Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Nganjuk.

Semoga di Acara RRC 2026 yang telah terselenggara kan tidak hanya meriah, tapi juga sarat akan makna dan memberikan dampak positif bagi seluruh peserta serta masyarakat yang hadir.

(Tok/Adv)

Gebyar Pajak Daerah, Bupati Jombang Warsubi Minta Seluruh Unsur Pemda Tingkatkan Penerimaan Pajak

JOMBANG, BN - Sebagai bentuk apresiasi resmi kepada masyarakat (wajib pajak) yang taat membayar pajak sekaligus momentum penting untuk membiayai dan mempercepat pembangunan daerah. Warsubi, Bupati Jombang dalam gelaran Gebyar Pajak Daerah di Pendopo Kabupaten Jombang. Bupati Jombang, meminta seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa dan kelurahan, bergerak bersama meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Bahkan menegaskan upaya itu tidak bisa hanya mengandalkan petugas pemungut, tetapi juga membutuhkan pendataan yang baik, pelayanan yang memadai dan kepatuhan wajib pajak.

Bahkan dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Khususnya 52 desa yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada hari pertama.

"Apresiasi juga kepada kecamatan yang menyelesaikan pelunasan sebelum jatuh tempo. Serta notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mendukung tertib administrasi perpajakan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ujar Warsubi.

Beliau juga berharap penghargaan itu menjadi motivasi untuk mempertahankan capaian sekaligus mendorong wilayah dan wajib pajak lainnya agar semakin tertib dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Warsubi juga meminta petugas pemungut mengoptimalkan penarikan pajak di wilayah masing-masing. "Pendataan harus dilakukan dengan baik. Komunikasi dengan masyarakat dibangun secara efektif. Serta penjelasan mengenai kewajiban perpajakan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami," ujar nya.

Selanjutnya pada pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif berkoordinasi serta memastikan proses pemungutan berjalan tertib sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

"Keberhasilan penerimaan pajak daerah membutuhkan kerja bersama. Karena itu, jangan sampai upaya peningkatan penerimaan hanya bertumpu pada petugas pemungut. Seluruh unsur pemerintah daerah harus mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangan," pungkasnya.

Sehingga untuk mengoptimalkan pemungutan, Warsubi menekankan pentingnya perbaikan pengelolaan pajak. Mulai dari pelayanan, administrasi hingga pengawasan. Selanjutnya untuk sinergi seluruh pihak perlu dijaga agar proses pemungutan berjalan lebih baik dan masyarakat mendapat pelayanan yang memadai.

Selain itu Pemkab Jombang juga mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bahkan itu termasuk memperluas pembayaran nontunai melalui QRIS. Selanjutnya Bupati berharap," kemudahan itu dimanfaatkan secara optimal agar pembayaran pajak semakin praktis, aman, dan tertib," ujarnya.



Bupati Jombang Warsubi saat memberi sambutan dalam Gebyar Pajak Daerah di Pendopo Kabupaten Jombang. **(ist)**

Bupati Jombang Warsubi mengajak bahkan menghimbau, wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu tanpa menunggu hingga mendekati jatuh tempo.

Pada "Gelaran" itu juga dihadiri Wabup Salmanudin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekdakab Jombang Agus Purnomo, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jombang. ***(Tok/Adv)***

Rapat Paripurna DPRD Jombang, Agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi


Bupati Jombang Warsubi dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji saat mengikuti Rapat Paripurna. **(ist)**

JOMBANG, BN – Beberapa pekan lalu DPRD Kabupaten Jombang melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 melalui rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Jombang Warsubi atas pemandangan umum Fraksi- Fraksi, Rabu (28/10/2026).

Pada forum ini menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif. Berbagai catatan fraksi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah sebelum rancangan anggaran memasuki tahap pemandangan akhir Fraksi dan penetapan menjadi peraturan daerah.

Ketika Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, jawaban bupati merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam pembahasan RAPBD 2027. Setelah agenda tersebut, DPRD akan melanjutkan pembahasan menuju penyampaian pemandangan akhir fraksi.

"Bupati tadi sudah menyampaikan jawaban terkait pemandangan umum fraksi. Agenda berikutnya pemandangan akhir fraksi dan akan ditetapkan menjadi Perda," ujar Ketua DPRD Jombang.

Selanjutnya di dalam rangkaian pembahasan ini menempatkan DPRD sebagai salah satu unsur penting dalam mengawal penyusunan kebijakan anggaran daerah.

Selanjutnya pada masukan fraksi menjadi sarana bagi legislatif untuk meminta penjelasan pemerintah sekaligus menelaah arah pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk tahun depan.

Didalam rapat paripurna tersebut, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan apresiasi terhadap pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Bupati Jombang, menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan legislatif diperlukan untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pembahasan Rancangan APBD yang berlangsung antara pemerintah dan DPRD merupakan proses demokrasi yang konstruktif untuk menghasilkan APBD yang lebih kuat dan akuntabel," kata Warsubi.

Dari sejumlah persoalan turut menjadi perhatian dalam jawaban bupati, antara lain proyeksi pendapatan transfer, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta efektivitas belanja pemerintah daerah.

Ketika mengenai proyeksi penurunan pendapatan transfer pada 2027, Warsubi menjelaskan bahwa rancangan APBD masih memperhitungkan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa.Bahkan pada komponen transfer lainnya akan dimasukkan setelah pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menetapkan alokasinya.

Selain itu disisi belanja, Pemerintah Kabupaten Jombang berencana melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Masa efisiensi akan diarahkan pada kegiatan yang dinilai kurang mendesak, sedangkan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat tetap menjadi priorit

Bagi DPRD Jombang, tahapan pembahasan RAPBD menjadi ruang untuk memastikan rencana pendapatan dan belanja pemerintah memiliki arah yang jelas.Pada pembahasan tersebut juga penting untuk menelaah kesesuaian antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pelayanan publik.

Jadi pada jawaban bupati disampaikan, proses pembahasan akan berlanjut pada pemandangan akhir fraksi-fraksi. Tahap berikutnya menjadi bagian dari rangkaian menuju penetapan RAPBD 2027 sebagai peraturan daerah. **(Tok/Adv)**

PPP Tamperan Gelar Sosialisasi CPIB, Jaga Mutu Hasil Tangkapan Sejak di Atas Kapal



PACITAN, BN - Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Pacitan, menjadi lokasi pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman dan Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal) bagi pelaku usaha penangkapan dan pengangkutan ikan, Senin (28/9). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya penanganan ikan yang baik sejak ikan ditangkap hingga didaratkan, sehingga mutu dan keamanan hasil tangkapan tetap terjaga.

CPIB merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Melalui penerapan cara penanganan ikan yang baik, kondisi higienis, serta pemeliharaan rantai dingin secara konsisten, mutu ikan hasil tangkapan dapat dipertahankan sejak berada di atas kapal hingga proses pendaratan. Penanganan yang tepat diharapkan dapat menjaga kesegaran, tekstur, cita rasa, nilai gizi, serta keamanan hasil perikanan.

Pelaksanaan CPIB memiliki landasan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang secara khusus mengatur persyaratan dan penerbitan Sertifikat CPIB. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi bagian dari landasan pengaturan standar kegiatan usaha dan produk sektor kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan perkembangan regulasi, Permen KP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan juga mengatur bahwa sertifikat cara penanganan ikan yang baik merupakan bagian dari sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam regulasi tersebut, pembinaan untuk mendapatkan sertifikat CPIB dapat dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi, dan/atau pemeriksaan lapangan, sedangkan pengendalian dilakukan oleh badan yang memiliki tugas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam materi sosialisasi, dijelaskan bahwa sertifikasi CPIB diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang memenuhi persyaratan pengendalian mutu dalam kegiatan penanganan ikan. Sertifikasi tersebut memiliki peran dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, meningkatkan daya saing produk, mendukung kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta membangun kepercayaan konsumen dan mitra usaha terhadap hasil perikanan yang dihasilkan.

Penerapan CPIB juga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha. Berdasarkan materi yang disampaikan, sertifikasi CPIB menjadi bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain sertifikat pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan di laut serta Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Pelaku usaha juga berkewajiban menerapkan cara penanganan ikan yang baik secara konsisten serta memenuhi ketentuan pelaporan kegiatan usaha.

Dalam sosialisasi turut menjelaskan mengenai tingkatan atau *grade* sertifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan. Untuk kapal berukuran sampai dengan 5 GT, sertifikasi dilakukan melalui mekanisme *self assessment*. Persyaratan lainnya mencakup dokumen perizinan usaha, sertifikat keterampilan atau pelatihan penanganan ikan bagi awak kapal, SKKP, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan karakteristik dan kegiatan kapal.

Dalam proses sertifikasi, pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem yang ditetapkan dengan melengkapi dokumen persyaratan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan atau inspeksi untuk memastikan penerapan standar CPIB di kapal. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi bahan evaluasi sebagai dasar pemberian rekomendasi sebelum sertifikat diterbitkan.

Inspeksi CPIB dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan penerapan standar di lapangan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan (*on-site visit*), *remote inspection*, maupun *self assessment*, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Aspek yang diperiksa antara lain prosedur operasional penanganan dan penyimpanan ikan, prosedur pembongkaran ikan, fasilitas penanganan dan penyimpanan, rekaman pemeriksaan sebelumnya, serta dokumen pendukung lainnya. Penerapan di lapangan juga memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, penanganan ikan secara higienis, dan terjaganya rantai dingin.

Selain pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai ketidaksesuaian yang dapat ditemukan dalam proses pemeriksaan. Ketidaksesuaian dapat dikategorikan berdasarkan tingkatannya, antara lain kritis, mayor, dan minor. Pemahaman terhadap kategori tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat melakukan tindakan koreksi secara tepat dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat memengaruhi mutu maupun keamanan hasil perikanan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman pelaku usaha penangkapan dan pengangkutan ikan mengenai penerapan CPIB semakin meningkat dan dapat diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional di atas kapal. Sosialisasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian persyaratan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan untuk mendorong pelaku usaha menerapkan prinsip penanganan ikan yang baik dalam setiap tahapan kegiatan.

Dengan penanganan yang tepat sejak di atas kapal, mutu hasil tangkapan dapat dipertahankan hingga didaratkan. Penerapan CPIB secara konsisten diharapkan dapat mendukung terwujudnya hasil perikanan yang bermutu dan aman, meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap hasil perikanan yang berasal dari kapal-kapal perikanan di PPP Tamperan.

(dkp/adv)

DPRD Kota Pagar Alam Gelar Rapat Paripurna, Agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap II Tahun Anggaran 2026







Berbagai moment kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Pagar Alam, Agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap II Tahun Anggaran 2026. **(ist)**

PAGAR ALAM, BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap II (Dua) DPRD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026, Selasa (13/10/2026)

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam, Hj. Dessy Siska. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing

Laporan hasil reses ini memuat berbagai aspirasi, usulan, serta kebutuhan masyarakat yang dihimpun secara langsung oleh anggota DPRD selama pelaksanaan reses. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku

Melalui penyampaian laporan hasil reses Tahap II ini, DPRD Kota Pagar Alam berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

(advleo)

Hari Sumpah Pemuda Ke-98, Pemkot Pagar Alam Gelar Upacara Gabungan



Para pejabat, tamu undangan dan tokoh pemuda usai mengikuti upacara hari Sumpah Pemuda. **(ist)**

PAGARALAM, BN - Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Pagar Alam menggelar Upacara Gabungan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-98 Tahun 2026, yang dirangkai pemberian bonus apresiasi atlet berprestasi Kota Pagar Alam, bertempat di Halaman Kantor Wali Kota Pagar Alam, Rabu (28/10/2026).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah didampingi Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha, Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam H. Syahrol Effendy, Unsur Forkopimda Sekretaris Daerah, Asisten Staf Ahli, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Hera Parianti Ludi, yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pagar Alam, Jajaran TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kota Pagar Alam, Ketua dan pengurus KONI, Organisasi Kepemudaan, serta para pelajar dan mahasiswa Kota Pagar Alam.

Sebelum upacara dimulai, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah memberikan secara langsung bonus apresiasi kepada para atlet Kota Pagar Alam yang mendapatkan medali dalam Porprov Sumatera Selatan ke-15 serta Pekan Paralympic Provinsi Sumsel Ke-5 di Kabupaten Muba.

Dalam amanatnya Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah menyampaikan, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, ia mengajak seluruh pihak untuk merenungi dan mengingat perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Sesuai tema yang diamanatkan pada hari sumpah pemuda tahun ini, "Patriotik, Gigih, dan Berempati Untuk Indonesia", mengingatkan bahwa cinta tanah air tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Wako H. Ludi juga mengajak generasi muda untuk berani mengambil peran dalam pembangunan, dimana dari seluruh pemuda dari organisasi seluruh Indonesia dulunya bersatu padu ingin membangun dan merdeka dari penjajahan, agar dapat bersatu padu memajukan Negara Indonesia.

Wako juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Kota Pagar Alam sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata terdepan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun nasional. "Untuk itu kita harus solid, kompak dan sama-sama berjuang membangun kota Pagar Alam," ajak Wako H. Ludi. **(leo)**

Bupati Bogor Rudy Susmanto : 2027 Disiapkan Transformasi Besar Menuju Literasi dan Arsip Digital



Bupati Bogor Rudy Susmanto saat memimpin Apel Pagi di Kantor Arsip. (ist)

BOGOR, BN - Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin apel pagi sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, Senin (2/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran dan kolaborasi perangkat daerah dalam mendorong kemajuan literasi serta tata kelola kearsipan di Kabupaten Bogor.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan suatu wilayah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas pendidikan, budaya literasi masyarakat, serta pengelolaan arsip yang tertata dan modern.

"Mulai 2027, kita ingin melakukan transformasi besar di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kita ingin budaya literasi masyarakat meningkat, digitalisasi arsip seluruh perangkat daerah dipercepat, dan dinas ini menjadi pusat informasi serta dokumentasi sejarah Kabupaten Bogor," ungkap Rudy.

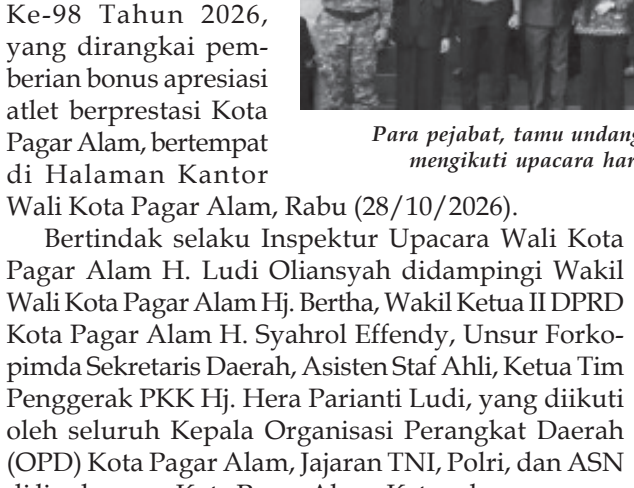
Ia juga meminta agar Dinas Arsip dan Perpustakaan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi motor penggerak program literasi dan kearsipan di seluruh perangkat daerah.

Berbagai program peningkatan budaya membaca, termasuk gerakan literasi di lingkungan sekolah, perlu dikolaborasikan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, Rudy menekankan pentingnya membangun sistem arsip digital yang terintegrasi.

Ke depan, Dinas Arsip dan Perpustakaan diharapkan menjadi leading sector dalam penyusunan standar dan pengelolaan arsip digital seluruh perangkat daerah, sehingga data dan dokumen pemerintahan dapat diakses secara lebih cepat, tertata, dan akuntabel.

Tidak hanya itu, Rudy Susmanto juga menginginkan gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan dikembangkan menjadi pusat edukasi sejarah Kabupaten Bogor. Berbagai dokumen penting dan rekam jejak perjalanan Kabupaten Bogor diharapkan dapat dihimpun, dilestarikan, serta disajikan sebagai sumber pengetahuan bagi generasi mendatang. **(eml)**

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda Tegas Berantas Narkoba, Barak di Tunggurono Dimusnahkan



Petugas Polres Binjai dan BNN saat memusnahkan barak diduga sarang Narkoba di Tunggurono. **(ist)**

BINJAI, BN - Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba melalui Operasi Sarang Narkoba (OSN) dan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Senin (26/10/2026) pukul 16.00 WIB, Satresnarkoba Polres Binjai dipimpin AKP Ismail Pane, S.H., M.H., bersama BNN Kota Binjai menggelar operasi di Jalan Simpang Kantor, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

Saat petugas melakukan penggerebekan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, barak tersebut sudah dalam keadaan kosong. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yakni 1 alat hisap (bong), 2 bungkusan besar berisi plastik klip transparan kosong, 6 kaca pirex, 2 pipet sekop, dan 10 plastik klip transparan," terang AKP Ismail Pane.

"Selanjutnya, bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba tersebut dirobohkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan," ujar Kasat narkoba.

Kapolres Binjai menegaskan, "kegiatan OSN dan P4GN merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika," terangnya

Polres Binjai mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

"Polres Binjai berkomitmen hadir untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan wilayah yang aman serta bebas dari bahaya narkoba," ujar AKBP Bimo Moernanda.

(Humasresbinjai/J.Saragih)

KPK Cecar Wabup Bogor Ade Ruhandi Soal Upah Pungut Bappenda



Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. **(Ist)**

BOGOR, BN - Terkait dugaan kasus upah pungut Kantor Bappenda Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Ade Ruhandi dan dua pejabat, Jum'at (30/10/2026) penuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan upah pungut di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daeràh (Bappenda) Kab Bogor.

Ade Ruhandi mengatakan, sebagai warga yang taat kepada hukum, "Saya harus memenuhi panggilan dari penegak hukum," ujar Ade Ruhandi kepada segenap Wartawan.

Informasi diperoleh Bidik Nasional (BN) Selasa (27/10/2026), KPK telah menjadwalkan kepada Ade Ruhandi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan kasus upah pungut yang menerpa di Pemkab Bogor, namun pihak KPK membatalkan jadwal pemeriksaan terhadap Ade Ruhandi dan akan dijadwal ulang.

Dalam keterangannya, Ade Ruhandi kepada wartawan mengatakan, KPK melakukan proses pemeriksaan dimulai pada pukul 10.00 WIB, namun karena akan melakukan sholat jum'at dipotong istirahat, setelah itu dilanjutkan sampai dengan selesai.

Lanjut Ade Ruhandi, dalam proses dimintai keterangan terkait kasus upah pungut KPK menanyakan saya sebagai jabatan Wakil Bupati Bogor, ujar Ade Ruhandi.

KPK di hari yang sama juga meminta keterangan terhadap dua pejabat Pemkab Bogor yakni, Ajat Jatnika selaku Sekda Kabupaten Bogor dan Arif Rahman Kepala Inspektorat.

(eml)

Bupati Asahan Tekankan Sinergi Daerah Dalam Rekomendasi Revisi UU Pemerintahan Daerah

ASAHAN, BN – Bupati Asahan,Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos.,M.Si., menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, pada Kamis, (29/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai sekira pukul10.00WIB tersebut menjadi forum untuk menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi dari pemerintah

■ **Bersambung ke hal.10 kol.3**



Bupati Asahan,Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos.,M.Si. **(tp)**

Wabup Lambar : Penyaluran KUR Harus Dipermudah, Petani Kopi Jangan Kesulitan Akses Modal



Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin.

LAMPUNG BARAT , BN – Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, meminta perbankan mempermudah akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani kopi dan pelaku UMKM. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat permodalan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mad Hasnurin saat membuka sosialisasi dan penyaluran KUR bagi petani kopi di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Selasa (03/11/2026).

Ia menegaskan, KUR merupakan fasilitas pembiayaan pemerintah untuk membantu pelaku usaha produktif memperoleh tambahan modal dengan skema yang lebih terjangkau.

"Saya berharap penyaluran KUR semakin mudah diakses, transparan, dan tepat sasaran. Petani yang memiliki usaha produktif harus mendapatkan informasi dan pendampingan agar tidak kesulitan dalam proses pengajuan," ujarnya.

Mad Hasnurin mengingatkan agar dana KUR dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti peremajaan tanaman kopi, pembelian pupuk, peningkatan kualitas hasil panen, hingga pengembangan produk olahan kopi.

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan KUR melalui BRI sebesar Rp100 juta kepada Ucok Munandar dan Rp75 juta kepada Hermi. Sementara melalui Bank Lampung SBU Liwa, disalurkan Rp90 juta kepada Dewi Asih dan Rp50 juta kepada Megawati.

Menurutnya, Lampung Barat memiliki potensi kopi yang besar. Karena itu, petani diharapkan tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas dan nilai jual kopi.

"Kita ingin KUR menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan akses modal yang lebih mudah dan pemanfaatan yang tepat, petani kopi bisa berkembang, usahanya semakin kuat, dan kesejahteraannya meningkat," tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Manager Senior Kantor OJK Provinsi Lampung Novandi Syafriansyah, pimpinan BUMN/BUMD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta sejumlah petani kopi. **(Taufik)**

Bupati Pinrang : Kualitas Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas Utama



Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos. (ist)

PINRANG, BN - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat membuka secara resmi kegiatan reakreditasi Rumah Sakit Lasinrang Pinrang, Selasa (27/10/2026).

Bupati Irwan mengungkapkan bahwa reakreditasi menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, mulai dari tata kelola, pemenuhan standar pelayanan, hingga kualitas layanan yang diterima pasien.

Melalui proses ini, berbagai kekurangan diharapkan dapat diidentifikasi dan dibenahi agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin baik.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan peralatan medis, tetapi juga oleh kesungguhan seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung dalam menjalankan tugas. Sikap profesional, integritas, dan keramahan dalam melayani menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat agar pasien dan keluarga merasa nyaman selama menjalani proses pengobatan.

Bupati Irwan juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan saran masyarakat. Masukan dari pasien dan keluarga merupakan bahan evaluasi yang berharga untuk mengetahui kebutuhan pelayanan sekaligus mendorong perbaikan pada aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, rumah sakit tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen mendukung pengembangan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembenahan fasilitas yang dibutuhkan.

Dukungan ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan kualitas kerja seluruh unsur rumah sakit. Melalui proses reakreditasi ini, Bupati Irwan berharap RSUD Lasinrang semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kualitas.

Upaya pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang pun berharap seluruh jajaran RSUD Lasinrang menjadikan momentum ini sebagai dorongan untuk terus berbenah, sehingga pelayanan kesehatan semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten pinrang. **(sabir/hans)**

Bupati Sidrap Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98



SIDRAP, BN- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan patriotisme, kegigihan, dan empati generasi muda dalam membangun bangsa.

Karakter ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kemajuan Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan, tetapi juga kualitas manusia dan kepedulian terhadap sesama.

Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan seragam Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kompleks Lapangan SKPD, Rabu (28/10/2026) pagi.

Turut hadir Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, Ketua DPRD Takyuddin Masse, Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda, Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Ady Kusumo Wibowo, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, jajaran pejabat Pemkab Sidrap, serta undangan lainnya.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti peserta dari berbagai unsur, antara lain Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap, KNPI, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, ASN, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutan yang dibacakan Bupati Sidrap, ditegaskan kemajuan sejati tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, atau kekayaan, tetapi juga dari karakter manusia, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, dan kepedulian sosial.

"Generasi muda harus memiliki jiwa patriotik, gigih dalam menghadapi tantangan, dan berempati terhadap sesama. Cinta tanah air tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui pengabdian dan tindakan nyata," ujar Syaharuddin.

Ia juga menekankan, generasi muda perlu menjadi pribadi yang kuat tanpa kehilangan kelembutan hati, berani memimpin sekaligus bersedia melayani, serta menjadikan ilmu, karya, dan pengorbanan sebagai wujud kecintaan kepada bangsa.

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan makna, kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arah, dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," terang Syaharuddin.

Ditambahkannya, masa depan bangsa bukan sekadar sesuatu yang akan ditemui, melainkan sesuatu yang sedang dibangun bersama melalui karakter, karya, dan kepedulian setiap generasi. **(sabir)**

Bupati Pinrang Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98

PINRANG, BN - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan kepedulian generasi muda dalam mengambil peran membangun bangsa.



Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos.

Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi diwujudkan melalui karya dan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Hal ini tergambar dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Kabupaten Pinrang yang dipimpin Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos selaku inspektur upacara di halaman Kantor Bupati Pinrang, Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan membacakan sambutan seragam Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemajuan bangsa membutuhkan generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air, pantang menyerah menghadapi tantangan, serta peka terhadap persoalan sosial di sekitarnya.

Bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan perlu diiringi karakter yang kuat agar generasi muda mampu berkontribusi bagi pembangunan sekaligus memberikan manfaat bagi sesama.

Semangat Sumpah Pemuda juga diharapkan menjadi dorongan bagi generasi muda Kabupaten Pinrang untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi penerus pembangunan, tetapi juga bagian penting dalam menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala perangkat daerah, serta peserta dari unsur TNI, Polri, organisasi kepemudaan, dan pelajar berbagai tingkatan.

(*sabir/hans)

Pemkab Sidrap Jajaki Kerjasama dengan Telkomsel



Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif bersama Wakil Bupati Nurkanaah menerima kunjungan jajaran Telkomsel di ruang kerja Bupati, Kamis (29/10/2026.

SIDRAP, BN - Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjajaki kerja sama dengan Telkomsel untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital, mulai dari konektivitas jaringan, pelayanan pemerintahan, hingga pendidikan.

Peluang kolaborasi tersebut dibahas saat Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif bersama Wakil Bupati Nurkanaah menerima kunjungan jajaran Telkomsel di ruang kerja Bupati, Kamis (29/10/2026).

Dari pihak Telkomsel, hadir Manager Local Government Account Management Sulawesi dan Papua Rachmad Septiarno, Manager Network Operation and Productivity Parepare Farid S. Alim, bersama tim.

Sementara Bupati dan Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Kominfo Sidrap Mahluddin, Kepala Dinas Perhubungan Andi Bahari Parawansa, Kepala Bagian Kerja Sama Andi Besse, serta jajaran terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Manager Local Government Account Management Sulawesi dan Papua Telkomsel, Rachmad Septiarno, memaparkan sejumlah solusi digital yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah.

Solusi tersebut mencakup basic connectivity berupa penyediaan jaringan serta advance connectivity untuk kebutuhan yang lebih spesifik, seperti sistem absensi berbasis seluler dan layanan sekolah terkoneksi.

"Telkomsel juga mengedepankan pendekatan berbasis komunitas untuk mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan pendidikan dan masyarakat," terangnya.

Di sektor pemerintahan, peluang pemanfaatan layanan digital antara lain penyampaian informasi kepada wajib pajak melalui pesan singkat atau SMS broadcast. Layanan ini dapat menjadi alternatif komunikasi, terutama ketika nomor telepon yang tercatat belum valid.

Selain itu, di sektor pariwisata, Telkomsel memaparkan peluang pemanfaatan solusi digital advertising untuk mendukung penyebaran informasi dan promosi destinasi daerah.

Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan terima kasih atas kedatangan jajaran Telkomsel dan menyambut baik peluang kerja sama yang ditawarkan.

Ia pun meminta Telkomsel berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidrap untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mempertajam aspek teknis program yang dapat diterapkan.

"Sidrap bergerak menuju digitalisasi. Kami terbuka untuk bekerja sama, silakan berkomunikasi dengan Dinas Kominfo untuk mempertajam aspek teknisnya," ujarnya.

Syaharuddin menegaskan, digitalisasi perlu menjangkau berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pertanian. Di bidang pendidikan, peluang kolaborasi dapat diarahkan pada sosialisasi teknologi kepada siswa, termasuk pengenalan coding dan artificial intelligence. (AI)

Ia juga mengingatkan, setiap rencana kerja sama mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan. Pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) serta kebutuhan mendesak masyarakat.

Karena itu, Bupati Syaharuddin mempersilakan Telkomsel menyampaikan proposal untuk dikaji lebih lanjut, terutama dari sisi kebutuhan teknis dan kesesuaiannya dengan prioritas daerah. **(sabir)**

Wabup Asahan Buka Kegiatan Kemitraan Usaha Mikro 2026



Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P. di Aula UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Asahan. **(tp)**

ASAHAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2026 yang dibuka oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., di Aula UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Asahan, Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 09.30 WIB ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Asahan dalam membangun kemitraan antara pelaku UMKM dengan jaringan ritel modern, sehingga produk lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk dipasarkan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan, Khualid Armansyah Lubis, S.Sos., M.I.Kom., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menjalin kerja sama dengan Indomaret agar produk UMKM Kabupaten Asahan dapat dipasarkan melalui gerai ritel modern.

Menurutnya, kemitraan ini diharapkan menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pasar yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan usaha mikro.

Ia berharap para peserta mampu menghasilkan produk yang layak jual, memiliki kualitas yang baik, serta mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.

Pemerintah Kabupaten Asahan, lanjutnya, siap mendukung upaya pemasaran produk UMKM agar dapat berkembang menjadi usaha yang lebih maju dan memiliki daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Menurut Rianto, pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas, standar produk, legalitas usaha, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pasar modern.

Ia menjelaskan, pelaku UMKM yang ingin memasuki jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart harus mempersiapkan produknya secara matang. Hal tersebut meliputi penjagaan mutu dan konsistensi produk, kepemilikan legalitas yang jelas, pemenuhan persyaratan dari pihak berwenang, serta perhatian terhadap kualitas kemasan dan kelengkapan informasi produk. **(TP)**

Wakil Bupati Asahan Dampingi Wamenag RI Dalam Konsolidasi Fahmi Ummi se-Sumut



Wakil Bupati Asahan, Rianto, saat mendampingi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, R. Muhammad Syafi'i. **(ist)**

ASAHAN, BN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mendampingi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum., dalam kegiatan Konsolidasi dan Silaturahmi Pengurus Fahmi Ummi kabupaten/kota se-Sumatera Utara bersama Pengurus Pusat Fahmi Ummi di Aula Gedung YPTQ Kisaran, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar-pengurus, memperkuat konsolidasi organisasi, serta meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai kewajiban sertifikasi halal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Agama RI, Wakil Bupati Asahan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Fahmi Ummi Wilayah Sumatera Utara, Ketua Fahmi Ummi Kabupaten Asahan Ummi Hj. Safrida Hanum Damanik, S.Pd., M.Pd., Plt. Ketua Umum Pengurus Pusat Fahmi Ummi Maya Suhasni Siregar, serta jajaran pengurus dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Fahmi Ummi Kabupaten Asahan, Ummi Hj. Safrida Hanum Damanik,menyampaikan bahwa konsolidasi dan silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar-pengurus serta meningkatkan kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Ia berharap Fahmi Ummi terus berkembang menjadi organisasi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam pembinaan keluarga dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan rasa bangga dan syukur atas kehadiran Wakil Menteri Agama RI di Kabupaten Asahan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, Rianto menyatakan dukungan terhadap berbagai kegiatan Fahmi Ummi dalam mewujudkan masyarakat yang religius, maju, dan berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Asahan.

Menurutnya, Fahmi Ummi memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang harmonis, mendukung pendidikan anak, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak usia dini.

Ia berharap Fahmi Ummi terus berperan aktif dalam pembinaan keluarga dan generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Ketua Umum Pengurus Pusat Fahmi Ummi, Maya Suhasni Siregar, menegaskan bahwa konsolidasi tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga sarana memperkuat pemahaman organisasi, menyatukan visi, meningkatkan kapasitas pengurus, dan meneguhkan komitmen dalam menjalankan amanah organisasi.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Agama RI, Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi'i, mendorong Fahmi Ummi agar semakin aktif dalam pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan pembangunan masyarakat. **(TP)**

Pemkab Asahan Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98

ASAHAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (28/10/2026) pukul 08.00 WIB. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran pemerintah daerah, unsurTNI-Polri, organisasi kepemudaan, pelajar,Pramuka, Paskibraka, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., bertindak membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut,ia menyampaikan pentingnya menjaga semangat persatuan yang telah diwariskan para pemuda Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Disampaikan bahwa 98 tahun silam,para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji yang menyatukan berbagai perbedaan, memperkuat perjuangan, serta meneguhkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia.

Semangat tersebut, menurut pesan Menteri Pemuda dan Olahraga,tidak boleh hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi harus terus hidup dan diwujudkan dalam karakter generasi penerus bangsa.

Kemajuan sejati, sebagaimana ditekankan dalam pidato tersebut, berawal dari manusia,karakter, hati yang mencintai tanah air, jiwa yang tidak mudah menyerah, serta kepedulian terhadap sesama.

Pembangunan Indonesia, lanjutnya, tidak cukup hanya ditandai dengan berdirinya gedung-gedung megah, perkembangan teknologi canggih, maupun kekayaan yang melimpah. Kemajuan yang sesungguhnya harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkarakter, memiliki semangat pengabdian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, generasi muda Indonesia diharapkan memiliki tiga karakter utama,yakni patriotik, gigih, dan berempati. Karakter patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata. Sikap gigih diwujudkan dengan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan maupun kegagalan. Sementara itu, empati berarti memiliki kepedulian terhadap sesama dan tidak berpaling ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Dalam pidato yang dibacakan Wakil Bupati Asahan tersebut, ditegaskan bahwa patriotisme harus berjalan seiring dengan kepedulian, kegigihan harus tetap berlandaskan nurani, dan kemajuan harus selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

(TP)

Bunda PAUD Asahan Buka Peragaan Manasik Haji Cilik 2026



Peragaan Manasik Haji Cilik 2026.

ASAHAN, BN - Bunda PAUD Kabupaten Asahan secara resmi membuka kegiatan Peragaan Manasik Haji Cilik Tingakat PAUD Kabupaten Asahan Tahun 2026 yang berlangsung di Masjid Ahmad Bakrie Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa, (27/10/2026). Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.243 anak dari 62 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

Pembukaan kegiatan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Asahan, Ny. Lily Evi Zainal Arifin. Peragaan manasik haji ini menjadi salah satu sarana pembelajaran bagi anak usia dini untuk mengenal tata cara pelaksanaan ibadah haji sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Ketua Panitia, Adi Sucipto, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Peragaan Manasik Haji Cilik Tahun 2026 diikuti oleh 1.243 peserta yang berasal dari 62 lembaga PAUD di seluruh Kabupaten Asahan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta dibagi ke dalam lima kelompok terbang (kloter). Pembagian tersebut dilakukan agar setiap rangkaian simulasi ibadah haji dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan memberikan pengalaman belajar yang baik bagi anak-anak.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) HIMPAUDI Kabupaten Asahan, Tukidi, S.T., S.Pd., menyampaikan bahwa HIMPAUDI merupakan organisasi mitra Dinas Pendidikan yang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Ia juga menegaskan kesiapan HIMPAUDI untuk terus menjalin kolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan dalam mendukung berbagai program yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak serta mewujudkan Kabupaten Asahan yang layak anak.

Dalam sambutan Bunda PAUD Kabupaten Asahan yang dibacakan oleh Ny. Lily Evi Zainal Arifin, disampaikan apresiasi kepada PD HIMPAUDI Kabupaten Asahan beserta seluruh panitia pelaksana yang telah menginisiasi dan bekerja keras menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, Peragaan Manasik Haji Cilik bukan sekadar simulasi pelaksanaan ibadah haji, melainkan juga metode pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kedisiplinan, serta kecintaan terhadap rukun Islam yang kelima sejak usia dini.

Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan dapat mengenal tahapan-tahapan ibadah haji secara sederhana sesuaidenganusiadantingkat pemahamanmereka. Selainitu, kegiatantersebut jugamenjadikesempatanbagi anak-anak untuk belajar tentang kebersamaan, menumbuhkan kemandirian, serta membiasakan diri bersikap tertib dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Pembelajaran melalui praktik langsung seperti ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mudah diingat oleh anak-anak, sekaligus memperkuat peran lembaga PAUD dalam membentuk karakter serta mengembangkan pendidikan agama sejak dini.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Pokja Bunda PAUD beserta rombongan Kabupaten Asahan, Kepala BidangPAUD Dinas Pendidikan, KetuaPD HIMPAUDI KabupatenAsahanTukidi, S.T., S.Pd., perwakilanPolsek Kisaran Kota, Ketua Bunda PAUD Kecamatan Kisaran Timur dan Kisaran Barat, guru pendamping, mutawif,serta anak-anak PAUD peserta peragaan manasik haji.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, HIMPAUDI, tenaga pendidik, dan seluruh pihak terkait semakin kuat dalam mendukung pendidikan anak usia dini, khususnya dalam pembentukan karakter, penguatan nilai keagamaan, serta pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Asahan.

Seluruh rangkaian Peragaan Manasik Haji Cilik Tingkat PAUD Kabupaten Asahan Tahun 2026 berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses. **(TP)**

Waspada Musim Hujan, Damkarmat Banyuwangi Siagakan Personel dan Armada 24 Jam



Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Banyuwangi, H. Edy Supriyono. **(Dj)**

BANYUWANGI, BN – Memasuki musim hujan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Banyuwangi meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir. Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Banyuwangi, H. Edy Supriyono, menegaskan bahwa seluruh jajaran personel dan armada operasional telah disiapkan secara optimal demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama 24 jam penuh.

"Terimakasih, untuk persiapan Damkarmat, yang pertama anggota harus sehat dalam penanganan bencana banjir. Apabila anggota Damkarmat dalam kondisi tubuh sehat dan prima, kapan pun siap bergerak guna membantu penanganan bencana banjir serta pemadaman kebakaran. Tim Damkarmat siap 24 jam," jelas Edy saat memberikan keterangan kepada bidiknasional.com pada Selasa (3/11/2026).

Selain kesiapan fisik personel, Damkarmat Banyuwangi juga telah menyiagakan sejumlah armada taktis untuk mempercepat mobilisasi ke area terdampak bencana. Sebanyak empat unit kendaraan pemadam kebakaran dan dua unit kendaraan rescue disiapkan khusus guna mendukung distribusi personel dan peralatan ke lokasi penanganan darurat.

Di samping fokus pada kesiapsiagaan bencana, Edy Supriyono memberikan atensi dan peringatan keras kepada seluruh anggotanya terkait kedisiplinan dan integritas. Ia menekankan agar seluruh personel menjauhi segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Beberapa kali kita sampaikan juga ke anggota Damkarmat, jauhilah penyalahgunaan narkoba. Apabila ada anggota terindikasi narkoba, biar ditanggung sendiri. Karena bagaimana pun juga narkoba adalah musuh Negara dan musuh rakyat, harus diberantas sampai tuntas," tegasnya.

Menjelang akhir tahun 2026, pihak Damkarmat menaruh harapan besar agar Kabupaten Banyuwangi terhindar dari segala bentuk bencana. Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan sekitar guna meminimalisir risiko kebakaran, meski cuaca saat ini mulai memasuki musim penghujan.

"Kami berharap masyarakat tidak membakar sampah dan lahan untuk pengalihannya. Kami juga meminta pengendara memberikan prioritas waktu untuk lewat bagi armada Damkarmat di jalan raya. Alhamdulillah, hingga saat ini kita tetap menjaga sinergitas serta koordinasi yang kuat dengan TNI, Polri, dan stakeholder terkait," pungkasnya. **(Dj)**

Revisi UU ...

Sambungan hal 8

daerah serta pemangku kepentingan guna menyempurnakan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan hal penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama meliputi pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bupati juga menekankan perlunya penyelarasan program pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.Dengan demikian,kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. **(TP)**

Istana : Penyadapan ...

Sambungan hal 2

Prasetyo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menyebut, penyadapan ilegal ini mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara.

"Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, illegal access untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita, dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu, yang luar biasa gitu lho," katanya. Maka dari itu, Prasetyo pun mengaku tidak mengerti tujuan dan motif Listyo menyadap Prabowo.

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," imbuh Prasetyo.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut, siapa pun dapat diperiksa dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo . Hal itu termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), apabila ditemukan fakta dan alat bukti yang cukup terkait perkara tersebut. "Pada intinya sih siapa pun yang cukup kuat fakta-fakta dan alat-alat buktinya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentu akan dilakukan terhadap siapa pun," kata Yusril kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Listyo Sigit Cs ditetapkan tersangka Eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan ketiga tersangka tersebut dalam kurun waktu 2025-2026. Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor HP yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System tanpa verifikasi. Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor HP itu disadap, padahal sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. "Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ucapnya.

Asep menyampaikan, petugas yang mengetahui tindakan ilegal itupun membuat Laporan Polisi (LP) pada tanggal 30 Oktober 2026. Setelah itu, kata dia, Bareskrim langsung memeriksa 10 saksi dan 3 ahli. "Kemudian kita telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu berupa HP sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, dan flashdisk 4 buah," kata Asep.

Asep menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyidikan secara scientific crime investigation, penyidik akhirnya menetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka.

Asep mengungkapkan, ketiga tersangka ini diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Untuk modus operandinya, ia menyebut, pada kurun waktu 2025-2026, Listyo, Eko, dan Ahrie memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum. Mereka juga menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut.

"Yang seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan harusnya sesuai aturan dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010, di mana harus menjamin prinsip penyelidikan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perbuatan tindak pidana dan berdasarkan undang-undang," kata Asep.

Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun. Lalu, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Terakhir, Pasal 32 ayat 1 dengan ancaman pidana 8 tahun. **(sumber: kompas.com/red)**

Profil 3 Jenderal ...

Sambungan hal 1

(GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah, saat menjabat Kapolresta Solo. Saat menjadi Kabareskrim, dia menangkap terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra yang jadi buron selama 11 tahun.

Sigit menjabat sebagai Kapolri sejak 2021 hingga 2026. Sigit kerap mendapat pujian dari Presiden Prabowo karena Polri ikut dalam berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis lewat SPPG Polri hingga penanaman jagung.

Dia kemudian digantikan oleh Jenderal Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Sigit dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sigit juga dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna. Penganugerahan itu diberikan langsung oleh Prabowo.

Irjen Ahrie Sonta ; Ahrie Sonta lahir di Bandung pada 1981. Dia lulus Akpol pada 2002. Ahrie kemudian dipercaya mengemban sejumlah jabatan di Polri. Dia pernah menjabat Kanit di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2018. Dalam dua bulan, dia membongkar peredaran 100 kg narkoba. Dia juga terlibat dalam operasi membongkar sindikat Taiwan dengan barang bukti 1,6 ton narkoba.

Ahrie pernah menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2020. Ahrie juga terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air.

Nama Ahrie makin dikenal karena menjadi satu-satunya perwira menengah Polri yang mendampingi Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kelayakan calon Kapolri di DPR pada 2021. Sigit kemudian mengangkat Ahrie sebagai sekretaris pribadi (sekpri).

Ahrie juga dikenal netizen Indonesia karena sering merespons berbagai keluhan lewat akun media sosialnya. Ahrie Sonta menjadi ajudan Presiden Prabowo dari Polri pada 2024. Pangkatnya naik jadi kombes.

Pangkatnya naik lagi jadi brigjen pada Oktober 2025. Pangkatnya naik menjadi irjen dan kemudian dipercaya oleh Kapolri Jenderal Suyudi menjadi Kadivkum Polri sejak Oktober 2026.

Irjen Eko Hadi ; Irjen Eko Hadi merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri. Eko merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1999. Dia pernah menduduki berbagai jabatan strategis. Nama Eko melejit saat dipercaya oleh Jenderal Sigit sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada 2025.

Eko terlibat dalam pengungkapan berbagai kasus peredaran narkoba yang beberapa di antaranya menyeret personel Polri, antara lain kasus yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka narkoba.

Pada 2026, Eko dan jajarannya membongkar peredaran sabu, ganja, dan etomidate dalam paket bernilai ratusan juta rupiah. Eko juga membongkar kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara jaringan narkoba Ko Erwin. **(Red)**

KPK : Kerugian ...

Sambungan hal 1

yang terungkap pada Februari lalu. Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada Oktober ini. KPK kemudian menggeledah Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah.

Budi belum mengungkap tempus atau waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di sektor cukai itu. "Untuk tempus-nya nanti kami update, ya. Jadi memang ini akan ditarik mundur ya untuk beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan," katanya. Budi mengatakan untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus itu, penyidik melakukan penggeledahan di Kudus, termasuk Kantor PT Djarum dan Kantor Bea Cukai setempat.

Ia juga belum mengungkap apa saja yang disita penyidik lantaran penggeledahan lanjutan di Kudus. "Sehingga di tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini. Artinya ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan negara khususnya di sektor cukai," katanya.

Terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Pusat PT Djarum, Corporate Communication Senior Manager Group, Djarum Budi Darmawan sebelumnya mengungkapkan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK."Kami menghormati dan menaati hukum," kata Budi Darmawan. **(sumber : cnn Indonesia)**

Sidoarjo Kirim ...

Sambungan hal 2

program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Bapak Asuh bagi masing-masing cabang olahraga (cabor). Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pendampingan sekaligus memenuhi kebutuhan atlet selama menjalani pembinaan.

"OPD ini nanti kita mapping sebagai bapak asuh cabor. Biar ada pendampingnya, sehingga kebutuhan dan semangat anak-anak kita terwadahi dengan baik. Pemerintah daerah akan terus hadir memberikan pembinaan, perhatian, dan mendorong kelancaran latihan mereka," tambah Subandi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, khususnya di bidang olahraga.

Menurut Rudi, dukungan pemerintah terhadap atlet diwujudkan melalui program Bapak Asuh, pencanangan beasiswa pendidikan lanjutan, serta fasilitas kesehatan melalui kolaborasi dengan Puskesmas dan kepesertaan BPJS. "Ini adalah wujud pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang olahraga. Kehadiran pemerintah di tengah-tengah atlet bertujuan untuk menumbuhkan semangat, spirit, dan mentalitas juara," jelas Rudi.

Rudi juga mengapresiasi sejumlah cabang olahraga yang telah lebih dahulu bertanding dan berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen Sidoarjo. Ia memastikan atlet berprestasi akan mendapatkan apresiasi berupa uang pembinaan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka**. (Adv/ Teddy Syah)**

Kurangi Banjir ...

Sambungan hal 2

PUBM Kabupaten Sidoarjo Makhmud menjelaskan bahwa progres pembangunan rumah pompa Sekardangan telah mencapai 11 persen, melampaui target sebesar 10 persen. Pembangunan tersebut meliputi pekerjaan plengsengan dan rumah pompa dengan peningkatan kapasitas pompa dari sebelumnya 50 liter per detik menjadi 250 liter per detik.

"Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir, khususnya di wilayah Sidokare dan sekitarnya. Nantinya, aliran air dari kawasan tersebut akan diarahkan menuju busem atau kolam penampungan sebelum dialirkan ke sungai," jelasnya.

Makhmud menambahkan, penanganan banjir juga dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan rumah pompa di sejumlah titik. Di antaranya kawasan Lippo, Banjarpoh, Sidokare, dan Sekardangan. Secara keseluruhan, terdapat 38 rumah pompa di Kabupaten Sidoarjo dengan kapasitas yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Khusus untuk penanganan banjir di kawasan Jalan Jati, depan Lippo Plaza, Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait rencana pembangunan saluran crossing pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

Saluran tersebut direncanakan untuk mengalirkan air dari kawasan rawan banjir menuju busem atau kolam penampungan, sehingga sistem pengendalian banjir di sekitar Lippo Plaza dapat berfungsi lebih optimal," tuturnya. **(yah)**

BDSF 2026 ...

Sambungan hal 5

AI, dengan rasa aman," ujar Suyono.

Melalui pendekatan lintas sektor, forum ini diharapkan memperkuat kesadaran bersama mengenai penggunaan teknologi secara aman. Upaya tersebut mencakup peningkatan literasi digital, kewaspadaan terhadap manipulasi AI, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut mengapresiasi penyelenggaraan forum yang digagas PWI Jawa Barat dan JHB tersebut.

Meski tidak dapat hadir langsung karena memiliki agenda kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, Farhan berharap kegiatan itu berlangsung lancar dan mampu meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan ruang digital.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari dorongan agar edukasi dan perlindungan digital tidak berhenti pada diskusi. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman praktis untuk mengenali risiko, sedangkan berbagai pihak perlu memperkuat koordinasi dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi.

Dukungan Lintas Sektor Perkuat Keamanan Digital

Penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026 mendapat dukungan lintas sektoral dari unsur pemerintah, perbankan, regulator, dan dunia usaha.

(Zaen)

Porwanas 2027 ...

Sambungan hal 5

kesuksesan Porwanas 2027.

Bahkan pihaknya berharap kontingen Jawa Barat mampu kembali meraih gelar juara dalam ajang olahraga wartawan tingkat nasional tersebut.

"Secara prinsip DPRD Jawa Barat mendukung kesuksesan Porwanas 2027 yang akan digelar di Lampung. Berharap kontingen Jawa Barat bisa kembali meraih gelar juara dalam pekan olahraga wartawan ini," ujar Yomanius.

Senada, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad menegaskan dukungan tersebut akan diperjuangkan secara kelembagaan, termasuk terkait keberangkatan kontingen Jawa Barat ke Lampung.

"Kami secara kelembagaan mendukung program kawan-kawan untuk ikut memberangkatkan kontingen Jawa Barat di Lampung. Secara kelembagaan akan kita perjuangkan agar kawan-kawan bisa berangkat," kata Hasbullah.

Anggota Komisi V DPRD Jabar lainnya, Zaini Shofari juga menyatakan komitmennya mendukung keikutsertaan PWI Jabar dalam Porwanas mendatang.

"Secara komitmen kita mendukung penuh Pekan Olahraga Wartawan ini. Jabar harus kembali meraih prestasi yang membanggakan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jabar, Tantan Sulthon Bukhawan menjelaskan, Porwanas 2027 akan diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN). PWI Pusat memutuskan menggabungkan kedua agenda tersebut ke April 2027 karena pelaksanaannya bertepatan dengan bulan Ramadan.

Tantan menyebutkan, Jawa Barat memiliki rekam jejak prestasi membanggakan dengan empat kali meraih gelar juara umum Porwanas. Bahkan, tiga gelar juara umum terakhir diraih secara berturut-turut sehingga Piala Presiden kini berada di PWI Jabar.

"Jawa Barat insyaallah akan menjadi peserta HPN dan Porwanas. Secara prestasi kita itu sudah empat kali juara. Satu kali tahun '96, yang terakhir tiga kali kita sudah bisa berhasil tiap tahun berturut-turut menjuarai, mendapat Piala Presiden karena juara umum berturut-turut selama tiga tahun," ungkap Tantan.

Meski demikian, pada penyelenggaraan terakhir kontingen Jawa Barat hanya mampu meraih medali perak. Kondisi tersebut menjadi motivasi bagi PWI Jabar untuk mengembalikan kejayaan di Porwanas 2027.

"Di Lampung ini kita punya cita-cita ingin mengembalikan kemenangan Porwanas yang sudah menjadi kebiasaan mungkin ya di Jawa Barat," katanya.

(Zaen)

Ade Surahman ...

Sambungan hal 5

belum ada keputusan yang jelas," ujar Ade Surahman saat menyampaikan keterangannya. Ia menjelaskan, dalam pertemuan terakhir yang melibatkan panitia pemilihan, kepala desa, camat, dan sekretaris camat, persoalan pelantikan anggota BPD terpilih belum memperoleh penyelesaian.

Ade juga menyebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung melalui Camat Cangkuang menghendaki dilaksanakannya pemungutan suara ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, usulan tersebut ditolak oleh Ade karena dirinya berpendapat hasil pemilihan yang telah ditetapkan panitia seharusnya dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. "Saya menolak pemilihan ulang. Hasil pemilihan sudah ditetapkan oleh panitia. Menurut saya, PSU seharusnya dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas, bukan hanya karena ada keberatan dari salah satu pihak," tegasnya.

Hasil Pemilihan Sudah Ditetapkan Panitia

Berdasarkan surat Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Tanjungsari Nomor 20/PAN-BPD/TS/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026, pemilihan anggota BPD telah dilaksanakan pada 18 Juli 2026. Hasil pemilihan kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Nomor 6/Skep/PAN-BPD/VII/2026 tertanggal 24 Juli 2026 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Tanjungsari periode 2026–2034.

Dalam surat tersebut, panitia menjelaskan bahwa proses pemilihan telah melalui tahapan verifikasi dan validasi persyaratan calon. Surat itu juga memuat penjelasan mengenai keberatan yang diajukan salah seorang calon, Wanda Wijaya, serta sejumlah pertemuan untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.

Tercatat, pembahasan telah dilakukan pada 8 September 2026 melalui mediasi yang difasilitasi kepala desa, kemudian pada 23 September dan 9 Oktober 2026 melalui rapat tindak lanjut pengaduan bersama DPMD. Pertemuan berikutnya berlangsung pada 15 Oktober 2026 untuk membahas tindak lanjut hasil pemilihan bersama Camat Cangkuang.

Dari rangkaian pertemuan itu, muncul dua usulan penyelesaian, yakni mendiskualifikasi Ade Surahman sebagai calon terpilih dan menggantinya dengan Wanda Wijaya, atau melaksanakan PSU. Namun, panitia menyatakan tidak dapat menerima usulan penggantian calon terpilih karena tahapan pemilihan telah selesai dan keputusan penetapan telah diterbitkan. Terkait PSU, surat tersebut menjelaskan bahwa para calon menolak usulan itu, kecuali Wanda Wijaya yang bersedia dengan catatan Ade Surahman tidak diikutsertakan dalam pemilihan ulang.

Atas kondisi tersebut, panitia memilih tetap berpegang pada keputusan penetapan hasil pemilihan yang telah diterbitkan. Dalam surat yang sama, panitia memohon kepada Kepala Desa Tanjungsari agar segera menyampaikan permohonan kepada Bupati Bandung melalui Camat Cangkuang untuk menerima, meresmikan, dan melantik anggota BPD terpilih periode 2026–2034.

Ade Minta Camat dan DPMD Memberikan Kepastian

Ade berharap Camat Cangkuang dan DPMD Kabupaten Bandung dapat memberikan penjelasan serta kepastian mengenai tindak lanjut hasil pemilihan tersebut.

Menurutnya, ketidakjelasan penyelesaian persoalan ini berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan kelembagaan BPD di tingkat desa. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dirinya sebagai anggota terpilih, tetapi juga kepentingan masyarakat Desa Tanjungsari yang membutuhkan keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ade juga mengungkapkan bahwa pelantikan anggota BPD direncanakan berlangsung secara serentak pada akhir Oktober 2026. Karena itu, ia berharap persoalan di Desa Tanjungsari dapat segera diselesaikan sebelum agenda pelantikan tersebut dilaksanakan. "Kalau tidak ada pergerakan, saya khawatir akan dilakukan pemilihan ulang melalui kecamatan. Padahal, hasil pemilihan sudah ditetapkan. Saya ingin ada kepastian agar anggota BPD terpilih bisa mengikuti pelantikan sesuai jadwal," katanya. **(Zaen)**

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI
BIDIK NASIONAL
EDISI 901/5-15 NOVEMBER 2026

Raperda APBD Tahun 2027 Jadi Sorotan

❑ Jalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Pasuruan

PASURUAN, BN – Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruanyang digelar, Senin (2/11/2026) memanas. Sejumlah persoalan krusial dalam Rancangan Peraturan Daerah yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2027, mendapat sorotan tajam.

Mulai dari rencana pinjaman untuk pembangunan sebesar Rp 363 miliar, penurunan proyeksi pendapatan dan besarnya belanja bantuan keuangan, hingga minimnya alokasi terhadap belanja modal untuk pendidikan tak luput dari perhatian dewan.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Pasuruan, Mujangki menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan fiskal, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja pembangunan.

Menurutnya, kualitas belanja harus menjadi prioritas agar anggaran daerah memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan ialah rencana pinjaman daerah senilai Rp 363 miliar.Kata Mujangki dikutip dari website link DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kewajiban pembayaran pinjaman akan ditanggung APBD pada tahun-tahun berikutnya, termasuk oleh pemerintahan daerah selanjutnya.

Karena itu, pemerintah daerah diminta terbuka mengenai rincian penggunaan pinjaman untuk setiap proyek, dasar penentuan alokasi, besaran bunga, biaya administrasi, masa tenggang, tenor, hingga jadwal pembayaran pokok dan bunga.

Selain itu, Pemkab Pasuruan diminta menyampaikan total kewajiban pembayaran sampai pinjaman lunas serta kajian kemampuan fiskal daerah selama masa pinjaman.

"Jangan sampai pembayaran cicilan pinjaman justru mengurangi anggaran untuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertanian, dan infrastruktur desa," ungkap Mujangki.

Kepastian kesiapan lahan, dokumen studi kelayakan, desain teknis serta perizinan, mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk proyek yang dibiayai pinjaman tersebut tak luput dari perhatian Fraksi PDI Perjuangan.

Proyeksi Pendapatan Turun, Bantuan Keuangan Capai Rp 576 Miliar

Selain pinjaman daerah, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan penurunan proyeksi pendapatan, khususnya sektor pajak daerah. Dalam pemandangan umumn fraksi PDI Perjuangan mencatat pendapatan pajak daerah pada Perubahan APBD 2026 diproyeksikan lebih dari Rp 1,312 triliun. Sementara dalam RAPBD 2027, angkanya lebih dari Rp 1,136 triliun.

"Pemkab harus memberi penjelasan mengenai penyebab penurunan tersebut beserta perinciannya berdasarkan sektor penerimaan," kata Arifin, Ketua Fraksi PDI Perjuangan

Di sisi lain, strategi peningkatan PAD juga diminta tidak membebani masyarakat kecil, pedagang tradisional, petani, peternak, maupun pelaku UMKM. Optimalisasi potensi ekonomi, pembenahan tata kelola aset daerah, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah.



Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2027

Kami turut meminta rincian belanja bantuan keuangan dalam kelompok belanja transfer yang mencapai Rp 576,37 miliar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan peruntukan dan pembagian anggaran tersebut agar alokasinya dapat dinilai berdasarkan kebutuhan serta manfaatnya bagi masyarakat.

Belanja Modal Pendidikan Hanya Rp 5 Miliar Lebih

Perhatian lainnya tertuju pada anggaran pendidikan. Fraksi PDI Perjuangan menilai belanja sektor pendidikan dalam RAPBD 2027 mengalami penurunan, baik pada belanja operasi maupun belanja modal, dibandingkan Perubahan APBD 2026.

Besaran belanja modal pendidikan yang hanya sekitar Rp 5 miliar lebih menjadi catatan khusus kami. Pemerintah daerah diminta menjelaskan rincian alokasi tersebut, terutama untuk memastikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tetap terpenuhi.

Di sektor kesehatan, kami meminta program Universal Health Coverage (UHC) tetap dilanjutkan dan ditingkatkan karena dinilai membantu masyarakat, khususnya kelompok miskin, dalam memperoleh layanan kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan tersebut dijawab secara terperinci oleh pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027.

Keterbukaan mengenai kemampuan fiskal, prioritas belanja, serta manfaat proyek yang dibiayai pinjaman dinilai penting agar kebijakan anggaran tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Catatan kritis juga disampaikan Fraksi PKB, dalam pemandangan umumnya partai pemenang Pileg itu menyoroti struktur postur pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2027 yang dipatok sebesar Rp3.528.332.982.321, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.761.705.401.360,59 dan pendapatan transfer Rp1.766.627.580.960,41. Pihaknya mengingatkan agar upaya menggenjot target PAD tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka administratif, melainkan tetap berpijak pada kemampuan ekonomi pelaku usaha kecil dan masyarakat luas.

"Peningkatan PAD hendaknya tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha agar tidak menambah beban rakyat kecil," ujar juru bicara Fraksi PKB, Sonhaji Abd. Wahid.

Pria yang akrab disapa Gus Son itu menambahkan, alokasi belanja daerah sebesar Rp4.075.185.923.222 wajib berpihak penuh pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah. Fraksi PKB mengapresiasi alokasi pendidikan sebesar Rp718.873.861.558 serta anggaran kesehatan senilai Rp1.113.037.395.854,97 untuk mendongkrak aksesibilitas layanan publik hingga ke perdesaan.

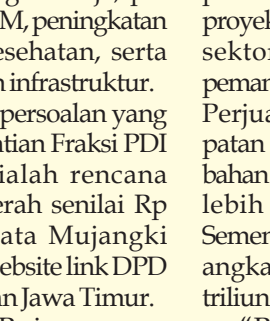
Senada dengan PKB, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Gaung Andaka Ranggi, menyampaikan apresiasi atas langkah berani pemerintah daerah merencanakan pinjaman utang untuk membiayai tiga proyek strategis, yakni pembangunan RSUD Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan, serta pembenahan objek wisata Pemandian Alam Banyubiru.

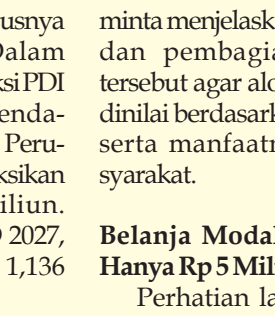
Kendati mendukung penuh akselerasi infrastruktur tersebut, Golkar memberikan catatan korektif agar eksekutif menghitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR) secara cermat. Pemerintah daerah didesak menyiapkan skema mitigasi risiko yang matang guna mengantisipasi segala kendala teknis maupun deviasi target pendapatan.

"Bagaimana proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman tersebut, dan apakah sudah ada skema mitigasi risiko jika proyek-proyek tersebut mengalami keterlambatan atau pendapatan yang tidak sesuai target?" tanya Gaung Andaka Ranggi.

Selain itu, Fraksi Golkar secara khusus menyoroti proporsi belanja modal sektor pendidikan yang dinilai masih sangat minim, yakni hanya menyentuh angka Rp5,1 miliar di tengah total anggaran pendidikan yang mencapai Rp718 miliar. Pihaknya mendorong adanya penambahan porsi belanja modal guna merehabilitasi ruang kelas sekolah yang rusak serta menunjang fasilitas belajar di wilayah terpencil. **(*/Red)**

Pemerintah Kabupaten Pamekasar
Mengucapkan
Selamat Hari Jadi
Pamekasan Ke-496 Tahun 2026

Bupati Pamekasan

Drs. Kholilurrahman, SH,M.Si.

Wakil Bupati Pamekasan

H. Sukriyanto

Sekda Pamekasan

Drs Taufikurrahman, M.Si.

Kepala Diskominfo

Muttqin, S.Sos, M.Si.

Kadis PUPR

Ika Yulia Rakhmawati ST, MT.

Kepala BKPSDM

Mohammad Alwi S.sos, Msi

Kepala Bapperida

Dodid Kirnadi HM, S.STP, MM.

Kepala Disporapar

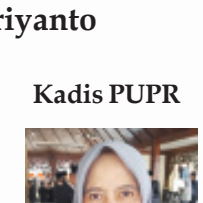
Akmalul Firdaus S.Sos, Msi

Kepala DLH

Supriyanto S.Sos,Msi.

Kepala Disperindag

Muharram ST, MT

Kadis PMD

Kusairi, SE.

DPRD Kabupaten Pamekasan
Mengucapkan
Selamat Hari Jadi Pamekasan
Ke-496 Tahun 2026

Ketua DPRD

ALI MASYKUR

Wakil Ketua

ISMAIL, SHI

Wakil Ketua

MOH. KHOMARUL WAHYUDI, SH

Wakil Ketua

KHAIRUL UMAM, SH.

Sekretaris DPRD

Drs Nur. Hidajatul Firdaus, Msi